

EKOFEMINISME DALAM ADVOKASI LINGKUNGAN

(Studi pada Aktivistis Perempuan Walhi Jawa Tengah)

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Sosiologi



Oleh:

Aji Muhammad

1706026018

**PROGRAM STUDI SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UIN WALISONGO SEMARANG
2023**

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara/i:

Nama : Aji Muhammad

NIM : 1706026018

Jurusan : Sosiologi

Judul Skripsi : Ekofeminisme Dalam Advokasi Lingkungan (Studi pada Aktivis Perempuan Walhi Jawa Tengah)

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 16 Juni 2023

Pembimbing


Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum

NIP. 196201071999032001

LEMBAR PENGESAHAN


LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
EKOFEMINISME DALAM ADVOKASI LINGKUNGAN
(Studi pada Aktivistis Perempuan Walhi Jawa Tengah)

Disusun Oleh:
Aji Muhammad
1706026018


Telah diujikan di depan penguji skripsi pada tanggal 7 Juli 2023
dan dinyatakan

LULUS
Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang


Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum
NIP. 196201071999032001


Sekretaris Sidang


Akhriyadi Sofyan, M.A
NIP. 198511182016011901

Penguji


Nur Hasyim
NIP. 19730323201601290

Pembimbing


Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum
NIP. 196201071999032001

PERNYATAAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil sendiri dan di dalam nya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi atau di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan, sumbernya jelas dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 25 juni 2023



1706026018

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, taufiq serta hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Ekofeminisme Dalam Advokasi Lingkungan (Studi pada Aktivis Perempuan Walhi Jawa Tengah)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw, nabi yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, arahan, serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo dan segenap pimpinan di UIN Walisongo Semarang,
2. Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M. Hum., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang serta selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,
3. Dr. H. Mochamad Parmudi, M. Si., selaku Ketua Jurusan Sosiologi UIN Walisongo Semarang,.
4. Kaisar Atmaja, M.A selaku dosen wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis
5. Segenap dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmu kepada penulis
6. Segenap civitas akademik yang telah membantu secara administratif,
7. Ibu Kayatun dan Bapak Ahmad Rodli selaku orang tua yang senantiasa memberikan dukungan do'a dan kasih sayang serta segalanya bagi penulis yang selalu penulis harapkan ridhonya,
8. Walhi Jawa Tengah selaku narasumber yang telah membantu memberikan informasi untuk penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
9. Teman-teman seperjuangan Sosiologi C 2017,
10. Keluarga besar Mawapala UIN Walisongo Semarang
11. Annisa Maharani yang telah memberikan dukungan
12. Terakhir, kepada segenap keluarga dan pihak-pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu namun turut membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Demikian ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang berjasa, semoga Allah SWT membalas dengan kebaikan yang lebih melimpah. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Semarang, 25 Juni 2023

Penulis

Aji Muhammad

MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

(Aji Muhammad)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua orangtua saya, Bapak Ahmad Rodli dan Ibu Kayatun

Terimakasih atas doa-doa yang dipanjatkan, pesan, pembelajaran, kasih sayang serta dukungan yang kuat sehingga menjadikan penulis termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Walisongo Semarang

ABSTRAK

Ekofeminisme merupakan gerakan sosial dan politik yang memadukan advokasi lingkungan dengan perjuangan hak perempuan, serta memandang lingkungan sebagai ruang hidup yang bersamaan untuk semua makhluk hidup. Dalam perkembangannya ekofeminisme dapat digunakan untuk memperkuat peran perempuan dalam gerakannya membela dan mendampingi masyarakat dalam upaya memperjuangkan keadilan lingkungan. Dalam konteks penelitian ini akan membahas bagaimana konsep ekofeminisme diimplementasikan dalam upaya advokasi lingkungan yang dilakukan oleh Aktivistis Perempuan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Tengah. Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan meliputi apa saja upaya pendampingan lingkungan, alasan melakukan pendampingan lingkungan, dan bagaimana dampak dari adanya pendampingan yang dilakukan oleh Aktivistis Perempuan Walhi Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosiologis dan mengaitkan temuan-temuan di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori yang sudah ditentukan. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada tiga orang aktivis Perempuan Walhi Jateng. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan mengkoordinasi data temuan dan dikelola menjadi satu kesatuan yang dapat diceritakan.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa Perempuan Walhi Jateng memiliki peran penting dalam upaya pendampingan lingkungan. Upaya pendampingan lingkungan yang dilakukan oleh Aktivistis Perempuan Walhi Jateng meliputi analisis kebijakan, assessmen, kajian lingkungan, kampanye lingkungan, pers rilis, dan pendidikan kritis lingkungan yang saling berkaitan satu sama lain menjadi sebuah strategi dalam advokasi lingkungan. Alasan utama yang menjadi dasar Perempuan Walhi melakukan advokasi lingkungan adalah munculnya permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh dominasi kaum patriarki sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan, perampasan hak masyarakat dan ketidakadilan gender di tengah masyarakat, oleh karena itu upaya pendampingan lingkungan menjadi penting dilakukan untuk memperjuangkan keadilan ekologis. Upaya pendampingan lingkungan oleh perempuan memiliki dampak penting terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat.

Kata Kunci : Ekofeminisme, Perempuan, Advokasi, Lingkungan, Aktivistis, Walhi Jateng

ABSTRACT

Ecofeminism is a social and political movement that combines advocacy for the environment with the struggle for women's rights, and views the environment as a living space that simultaneously exists for all living things. In its development, ecofeminism can be used to strengthen the role of women in their movement to defend and assist the community in efforts to fight for environmental justice. In the context of this research, it will discuss how the concept of ecofeminism is implemented in environmental advocacy efforts carried out by female activists from the Indonesian Forum for the Environment (Walhi) in Central Java. This research will answer several questions including what are the environmental assistance efforts, the reasons for carrying out environmental assistance, and what is the impact of the assistance carried out by female activists from Walhi Central Java.

This research is a qualitative research with a descriptive analysis approach that aims to describe sociological phenomena and relate findings in the field and then relate them to a predetermined theory. In this study, data collection was carried out by observation, interviews, and documentation. Primary data was obtained from the results of interviews conducted with three female activists from Walhi Central Java. The data analysis used is qualitative data analysis by coordinating the findings and managing the data into a single unit that can be told.

Based on the findings in the field, it can be concluded that Central Java Walhi women have an important role in environmental assistance efforts. Environmental assistance efforts carried out by female activists from Walhi Central Java include policy analysis, assessments, environmental studies, environmental campaigns, press releases, and environmental critical education which are interrelated with one another to become a strategy in environmental advocacy. The main reason that becomes the basis for WALHI women to carry out environmental advocacy is the emergence of environmental problems caused by the domination of the patriarchy, causing environmental damage, usurpation of community rights and gender injustice in society. Therefore, efforts to provide environmental assistance are important to fight for ecological justice. Environmental assistance efforts by women have an important impact on the environment, social and economic community.

Keywords: Ecofeminism, Women, Advocacy, Environment, Activists, Walhi Central Java

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Kerangka Teori	8
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan Skripsi	19
BAB II ADVOKASI LINGKUNGAN OLEH PEREMPUAN DAN	
TEORI EKOFEMINISME	21
A. Advokasi Lingkungan Oleh Perempuan	21
1. Advokasi Lingkungan	21
2. Perempuan.....	23
3. Ekofeminisme	24
4. Penjagaan lingkungan dalam Islam.....	26
B. Teori Ekofeminisme Vandana Shiva	27
1. Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva.....	27
2. Asumsi Dasar Teori Ekofeminisme Vandana Shiva.....	31
3. Istilah Kunci Teori Ekofeminisme Vandana Shiva.....	33

BAB III WALHI JAWA TENGAH	43
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah	43
1. Kondisi Geografis	43
2. Kondisi Topografis	44
3. Kondisi Demografis	45
B. Profil Walhi Jawa Tengah.....	45
1. Sejarah berdirinya WALHI Jawa Tengah.....	46
2. Visi misi dan Logo WALHI Jawa Tengah.....	47
3. Strategi dan Aksi Walhi Jateng.....	48
4. Nilai-Nilai Dasar dan Prinsip - prinsip Organisasi	49
5. Struktur Organisasi dan Lembaga Anggota WALHI Jawa Tengah 2023	50
6. Program Kerja WALHI Jawa Tengah	51
BAB IV UPAYA PENDAMPINGAN YANG DILAKUKAN OLEH AKTIVIS	
PEREMPUAN WALHI DAN ALASANNYA	55
A. Upaya Pendampingan Lingkungan	55
1. Analisis Kebijakan	56
2. Assessment	58
3. Kajian lingkungan	61
4. Mengorganisir Aksi.....	64
5. Kampanye Lingkungan	66
6. Rilis Pers	68
7. Pendidikan Kritis Lingkungan.....	69
B. Alasan Perempuan Walhi Melakukan Pendampingan Lingkungan.....	72
1. Analisis Kebijakan	72
2. Assessment	74
3. Kajian Lingkungan	75
4. Mengorganisir Aksi.....	76
5. Kampanye Lingkungan	77
6. Rilis Pers	78
7. Pendidikan Kritis Lingkungan.....	79

BAB V DAMPAK DILAKUKANNYA PENDAMPINGAN OLEH AKTIVIS PEREMPUAN WALHI JAWA TENGAH	81
A. Dampak Lingkungan	81
1. Pelestarian Lingkungan Hidup	82
2. Pengurangan Sampah	83
3. Mencegah Banjir	85
B. Dampak Sosial Masyarakat.....	86
1. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	86
2. Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat tentang politik dan keadilan lingkungan	87
3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan.....	88
4. Membentuk jaringan dan solidaritas	89
C. Dampak Ekonomi.....	90
1. Peningkatan nilai ekonomi produk lokal.....	90
2. pengembangan UMKM.....	91
BAB VI PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP	10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekofeminisme merupakan gerakan sosial dan politik yang memadukan advokasi lingkungan dengan perjuangan hak perempuan, serta memandang lingkungan sebagai ruang hidup yang bersamaan untuk semua makhluk hidup (Shiva, 1988). Ekofeminisme berusaha memadukan antara ekologi dan feminisme dalam sebuah gerakan yang sinergis. Keterkaitan feminisme dan lingkungan ini tidak terlepas dari adanya kesamaan situasi dan posisi perempuan dan alam yang selalu ditindas oleh kekuatan patriarki (Mies dan Shiva, 2014). Ekofeminisme memperjuangkan hak-hak lingkungan dan hak-hak perempuan, serta memperjuangkan kesetaraan gender dan pemeliharaan lingkungan hidup. Penindasan terhadap alam dan perempuan harus dihentikan dengan cara merubah pola pikir dan menyingkirkan kebijakan patriarki yang menindas yang ada dimasyarakat. Alam dan perempuan dalam perspektif etika ekofeminisme memiliki kesamaan nasib yaitu sama-sama tertindas (Warren, 2002). Sedangkan Advokasi lingkungan adalah suatu upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam melobi, mempengaruhi, mengatur, dan memobilisasi kekuatan social untuk mencapai tujuan bersama dalam perjuangan lingkungan (Esteban, 1997). Tujuan dari advokasi lingkungan adalah untuk menciptakan kesadaran dan aksi nyata yang mengarah pada perlindungan lingkungan hidup.

Kajian tentang ekofeminisme telah banyak dilakukan salah satunya adalah penelitian yang ditulis oleh Hakim (2018). Penelitian ini membahas bagaimana konsep ekofeminisme diterapkan dalam Gerakan Perempuan Pungkat Bersatu dalam menolak perusahaan kelapa sawit yang akan masuk di desa Pungkat. Dalam kasus yang ditulis dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa perempuan menjadi salah satu dari sekian banyak korban yang paling merasakan dampak yang terjadi dari masuknya perusahaan kelapa sawit. Hal ini menyebabkan mereka membentuk sebuah gerakan perempuan yang beranggotakan masyarakat desa. Hasil penelian ini menunjukkan bahwa konsep

ekofeminisme dapat membantu memperkuat gerakan perempuan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan lingkungan menolak perusahaan kelapa sawit. Perempuan dan masyarakat punggad mempunyai pemikiran bahwa hutan merupakan sumber kehidupan yang diberikan Tuhan tidak hanya untuk masyarakat punggad, tapi untuk semua makhluk hidup (Hakim. 2018).

Masalah lingkungan atau isu ekologi menjadi sebuah pokok bahasan yang serius di kalangan akademisi dan aktivis lingkungan. Masalah lingkungan ini diakibatkan oleh pembangunan yang berdampak pada eksploitasi alam. Dampak dari eksploitasi alam ini semakin hari semakin memprihatinkan. Dampak dari kerusakan lingkungan ini akan menjadi masalah besar bagi keberlangsungan makhluk hidup. Pembangunan yang berdampak pada eksploitasi alam ditengarai menjadi masalah lingkungan karena menggunakan pendekatan patriarki. Dampak dari kerusakan lingkungan itu mendapat perhatian dari para aktivis lingkungan termasuk aktivis perempuan. Dominasi kaum patriarkhi tidak hanya berdampak buruk bagi alam tetapi juga kaum perempuan. Ekofeminisme merupakan sebuah pemikiran dan gerakan sosial yang menghubungkan masalah ekologi dan perempuan. Ekofeminisme hadir untuk memberikan pemahaman bahwa pentingnya menjaga kelestarian alam dan kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Perempuan memegang peran penting dalam berbagai kegiatan advokasi lingkungan. Namun, perempuan seringkali kurang terwakili dalam posisi kepemimpinan dan kurang memiliki akses yang sama untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan lingkungan. Oleh karena itu, peran aktivis perempuan penting untuk dikaji lebih lanjut.

Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah (Walhi Jateng) merupakan sebuah organisasi lingkungan yang berfokus pada advokasi dan pembelaan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Organisasi ini memiliki visi dan misi yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup yang adil, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, petani, dan nelayan dalam mengakses sumber daya alam. Di Jawa Tengah, Walhi aktif bergerak dalam mengadvokasi hak-hak lingkungan hidup. Dalam upayanya

untuk memperjuangkan hak-hak tersebut, Walhi melibatkan berbagai pihak, termasuk perempuan dalam organisasi ini. Permasalahan lingkungan di Jawa Tengah sangat beragam, mulai (1) Pembangunan yang tidak terkendali, (2) Peningkatan jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan ketersediaan sumber daya alam, (3) Praktik-praktik industri yang tidak ramah lingkungan menjadi faktor penyebab masalah lingkungan yang merugikan masyarakat.

Aktivis perempuan Walhi Jawa Tengah memiliki peran penting dalam advokasi lingkungan hidup, baik dalam tindakan langsung maupun melalui kampanye dan gerakan-gerakan social lainnya. Para aktivis perempuan ini dapat dianggap sebagai perempuan yang memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan atau setidaknya telah memiliki kesadaran tentang peran strategis mereka sebagai perempuan dalam persoalan lingkungan. Beberapa dari mereka bahkan telah diakui secara professional oleh komunitas dan anggota masyarakat lain sebagai figur penting yang mampu menggerakkan kesadaran masyarakat serta mampu membantu masyarakat untuk memperoleh hak nya. Sebagai seorang aktivis perempuan bidang lingkungan di Walhi Jawa Tengah tidaklah mudah. Kuatnya akar budaya dan politik patriarki yang ada dalam sistem sosial masyarakat mengharuskan mereka untuk mampu membagi waktu antara berkegiatan di dalam dan di luar rumah dengan sama baiknya.

Gambar. 1

Aktivis Perempuan dalam Aksi Peringatan Internasional Women's Day di Semarang



Sumber: Instagram Walhi Jateng

Walhi Jawa Tengah bersama dengan aktivis perempuan telah banyak melakukan aksi-aksi advokasi lingkungan. Kerja-kerja advokasi dan kampanye yang dilakukan oleh WALHI Jateng meliputi kerja jaringan, kampanye, pendidikan rakyat, pendampingan, membentuk organisasi rakyat hingga kerja-kerja pengorganisasian untuk mendesak perubahan suatu kebijakan. Salah satunya yaitu Aksi International Women's Day Semarang 2023 dengan tema Lawan Penindasan, Wujudkan Kesejahteraan Perempuan. International Women Day (IWD) bukan sekedar momen incidental. IWD memuat sejarah panjang perjuangan perempuan, yang dalam berbagai level mengalami kekerasan dan penindasan baik vertical maupun horizontal. Atas dasar kebutuhan kolektif dan mengekspresikan perlawanan, berbagai unsur dan elemen masyarakat di Jawa Tengah yang tergabung dalam jaringan IWD Semarang melakukan aksi diam sebagai protes terhadap Negara. Aksi dimulai dengan pengantar dan perkenalan aksi selanjutnya disambung dengan penyampaian orasi tentang kondisi perempuan, kasus-kasus kekerasan berbasis gender, teatrikal yang diperankan oleh penyintas, diam sejenak, dan kemudian pembacaan manifesto melalui aksi ini. Salah satu tuntutananya yaitu Ciptakan ruang aman dan kebebasan

berekspresi bagi keberagaman gender dan seksualitas di Indonesia, Khususnya di Jawa Tengah. (Pres rillis IWD Semarang. 2023).

Penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana ekofeminisme diimplementasikan dalam advokasi lingkungan oleh aktivis perempuan Walhi Jawa Tengah. Penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan seperti apa saja kegiatan advokasi dan pendampingan lingkungan yang dilakukan Walhi Jateng? Bagaimana alasan mereka melakukan kegiatan tersebut? Bagaimana dampak dari kegiatan advokasi dan pendampingan tersebut terhadap masyarakat dan lingkungan? Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan konsep teori ekofeminisme dalam advokasi lingkungan oleh aktivis perempuan Walhi Jateng dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pandangan baru tentang peran perempuan dalam advokasi lingkungan dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam konservasi lingkungan di Indonesia.

Gerakan perempuan yang masif dalam penyelamatan lingkungan mendorong untuk mewujudkan kesetaraan gender, dimana perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam penyelamatan lingkungan. Gerakan ekofeminisme merupakan gerakan yang sangat menonjol dalam pembelaan dan penyelamatan lingkungan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Ekofeminisme Dalam Advokasi Lingkungan (Studi pada Aktivis Perempuan Walhi Jawa Tengah)”**. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab bagaimana teori ekofeminisme dapat diimplementasikan dalam advokasi lingkungan oleh aktivis perempuan Walhi Jawa Tengah.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kegiatan pendampingan lingkungan aktivis perempuan Walhi Jawa Tengah?
2. Bagaimana alasan Perempuan Walhi Jateng melakukan pendampingan lingkungan?
3. Bagaimana dampak dari pendampingan terhadap masyarakat dan lingkungan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa saja kegiatan pendampingan lingkungan Walhi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui alasan aktivis perempuan Walhi Jateng melakukan kegiatan pendampingan lingkungan.
3. Untuk mengetahui dampak dari pendampingan yang dilakukan perempuan walhi Jateng terhadap masyarakat dan lingkungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam meningkatkan analisis serta pandangan lain tentang feminisme, tentang hak-hak dasar perempuan dan gerakan perempuan yang kini mulai aktif dalam penyelamatan lingkungan hidup.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan bisa menjadi sumbangan pengetahuan serta menjadi pendorong untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia, dimana perempuan juga memiliki hak dan kewajiban yang lebih dalam penyelamatan lingkungan hidup.

E. Tinjauan Pustaka

1. Ekofeminisme

Kajian mengenai ekofeminisme banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Adapun kajian atas ekofeminisme ini antara lain, penelitian, Suparno dan Sutopo (2019), Sari dan Kurniasih (2020), Kumalasari, S., dan Ramantika (2020), Yuliani (2019). Pada penelitian yang dilakukan oleh Suparno, dan Sutopo (2019), membahas bagaimana konsep ekofeminisme diterapkan dalam Gerakan lingkungan di desa Tlahab, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsep ekofeminisme dapat membantu memperkuat gerakan lingkungan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam gerakan lingkungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Kurniasih (2020)

menganalisis perspektif ekofeminis dalam gerakan lingkungan di Kota Bandung. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pandangan ekofeminis dapat membantu mengidentifikasi akar permasalahan lingkungan dan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kumalasari dan Ramantika (2020) membahas tentang kontribusi konsep ekofeminisme dalam pendidikan lingkungan hidup. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan lingkungan hidup yang menggunakan konsep ekofeminisme dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang lingkungan dan membantu memperkuat kesadaran lingkungan (Kumalasari, S., dan Ramantika, D., 2020). Lain halnya penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2020), penelitian ini mengeksplorasi bagaimana perempuan di desa Mlonggo terlibat dalam advokasi lingkungan, dan bagaimana perspektif feminis dapat memberikan kontribusi pada gerakan advokasi lingkungan di desa tersebut. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa perempuan memiliki peran yang penting dalam advokasi lingkungan di desa tersebut dan perspektif feminis dapat membantu meningkatkan kesadaran dan partisipasi perempuan dalam gerakan advokasi lingkungan. (Yuliani. 2020).

2. Advokasi Lingkungan

Kajian tentang advokasi lingkungan juga sudah banyak dibahas oleh beberapa peneliti antara lain: Dian Ardiansyah dan Agus Satmoko (2022), Nawir (2020), Ramaditya R. dan Ibnu F.Z., (2021), Ririn Sari Yustisia, Dkk (2021), Suryanto, A.D dan Widayati, S. (2020). Pada penelitian yang dilakukan oleh Dian Ardiansyah dan Agus Satmoko (2022) membahas tentang peran LSM Ecoton dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat daerah aliran sungai brantas. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran LSM Ecoton dalam upaya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup masyarakat aliran sungai Brantas melalui program penelitian partisipatif seperti melalui kegiatan biotilik dengan mengedepankan kemudahan untuk masyarakat, edukasi kepada masyarakat seperti adanya kegiatan dengan konsep *zero waste cities* dengan

menciptakan lingkungan hidup yang bebas sampah, advokasi lingkungan kepada pemerintah dengan dilakukannya aksi protes dan gugatan serta pendampingan di dalam maupun di luar pengadilan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nawir (2020) membahas tentang politik kebijakan lingkungan Walhi Sulawesi Selatan yang fokus pada advokasi kebijakan lingkungan hidup di kecamatan Tombolopao kabupaten Gowa. Penelitian ini menunjukkan bahwa Walhi Sulawesi Selatan berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat, baik dari tahap perumusan hingga pada tahap evaluasi kebijakan. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa hambatan-hambatan yang dialami oleh walhi Sulawesi selatan dalam melakukan advokasi lingkungan ada 2 faktor yaitu internal meliputi Sumber daya manusia dan sumber daya finansial, sedangkan factor eksternal terdiri atas pemerintah dan penegak hukum.

Penelitian yang dilakukan Ramaditya R. dan Ibnu F.Z (2021) membahas tentang Jejaring aktor dalam upaya perubahan kebijakan yang fokus pada kasus advokasi kebijakan dalam menolak izin lingkungan pengolahan limbah berbahaya dan beracun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Gerakan Lakardowo Mandiri yang menggunakan sumber daya jaringan yang ada dalam menolak kebijakan izin lingkungan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diberikan oleh pemerintah kabupaten Mojokerto kepada perusahaan PT. Putra Restu Ibu Abadi di desa Lakardowo kecamatan jetis kabupaten Mojokerto. Hasil dari penelitian ini disebutkan bahwa jejaring dalam sebuah advokasi kebijakan memberikan sebuah dampak bagi kelompok utama yang melakukan sebuah perjuangan dalam upaya menciptakan perubahan kebijakan. Sedangkan dalam penelitian Ririn Sari Yustisia, Dkk membahas tentang strategi advokasi lingkungan hidup dalam peningkatan kesadaran masyarakat pedesaan dengan studi kasus di Desa Bodeh, Kabupaten Pemalang, menemukan bahwa strategi advokasi lingkungan yang efektif dapat meningkatkan kesadaran masyarakat pedesaan akan pentingnya lingkungan hidup. Pembahasan hamper serupa dilakukan oleh Suryanto, A.D dan

Widayati, S. yang membahas tentang peran advokasi lingkungan di kota Semarang, menjelaskan bahwa advokasi lingkungan yang dilakukan oleh LSM dan Pemerintah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Suryanto, A.D dan Widayati, S. 2020).

F. Kerangka Teori

1. Definisi Konseptual

a. Ekofeminisme

Secara konseptual, ekofeminisme dapat diartikan sebagai gerakan atau pandangan yang mengangap bahwa kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi. Pandangan ini mengkritik dan menolak diskriminasi gender, serta menentang penghancuran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan. Ekofeminisme juga mempromosikan keterlibatan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan dan memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Menurut Maria Mies, ekofeminisme adalah pemahaman dan analisis yang berpusat pada hubungan antara diskriminasi gender dan kerusakan lingkungan serta upaya untuk menciptakan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan. (Shiva & Mies. 1993)

Vandana Shiva memberikan gambaran mengenai ekofeminisme yaitu Gerakan sosial dan politik yang memadukan advokasi lingkungan dengan perjuangan hak perempuan, serta memandang lingkungan sebagai ruang hidup yang bersamaan untuk semua makhluk hidup (Vandana Shiva. 2005). Definisi lain dari ekofeminisme menurut Dr. Ika Saridewi dalam jurnal “Ekofeminisme: Kritik atas Dominasi Patriarki terhadap Perempuan dan Lingkungan” menyatakan bahwa ekofeminisme adalah Gerakan sosial dan politik yang menghubungkan antara kekerasan terhadap alam dan kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak dari dominasi patriarki. Definisi ekofeminisme ini menekankan pentingnya memperjuangkan keberlanjutan lingkungan

dan hak perempuan secara bersamaan serta mengeksplorasi hubungan yang kompleks antar keduanya. Ekofeminisme juga menekankan perlunya pengakuan terhadap nilai-nilai yang diabaikan dalam kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan serta peran perempuan dalam mengatasi masalah lingkungan. Konsep ekofeminisme memiliki implikasi yang signifikan bagi perjuangan lingkungan dan perempuan. Ia memperkuat peran perempuan dalam memperjuangkan hak lingkungan dan membantu untuk memperbaiki hubungan antara perempuan dan lingkungan. Konsep ini akan digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian ini untuk menjelaskan peran aktivis perempuan dalam advokasi lingkungan

b. Advokasi lingkungan

Advokasi lingkungan adalah upaya untuk membela dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan atau degradasi akibat kegiatan manusia. Tujuan dari advokasi lingkungan adalah untuk menciptakan kesadaran dan aksi nyata yang mengarah pada perlindungan lingkungan hidup. Advokasi lingkungan dapat dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi, dan meliputi berbagai strategi, termasuk kampanye, aksi protes, pengawasan kebijakan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut C. Esteban, advokasi lingkungan adalah suatu upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam melobi, mempengaruhi, mengatur, dan memobilisasi kekuatan sosial untuk mencapai tujuan bersama dalam perjuangan lingkungan (Esteban, 1997). Menurut Suryana (2013), advokasi adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan tertentu dengan cara mengumpulkan dukungan dari masyarakat, mengadakan kampanye, melakukan lobi, dan aksi-aksi lainnya.

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa advokasi merupakan upaya untuk memperjuangkan hak, kepentingan, atau tujuan tertentu melalui kegiatan yang terorganisir dan sistematis. Advokasi dapat

dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan tertentu dengan cara mengumpulkan dukungan dari masyarakat, mengadakan kampanye, melakukan lobi, dan aksi-aksi lainnya. Tujuan utama dari advokasi adalah untuk mencapai perubahan sosial yang positif dan memperjuangkan hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Dalam konteks penelitian ini, advokasi lingkungan digunakan sebagai kerangka teori yang mengacu pada upaya advokasi atau advokasi yang dilakukan oleh aktivis lingkungan dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup. Konsep advokasi lingkungan juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan perlunya kebijakan publik yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Advokasi lingkungan juga dianggap sebagai strategi yang efektif dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup, yaitu hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, dan lestari. Upaya advokasi lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melakukan kampanye sosial, mengajukan gugatan hukum, dan mengorganisir aksi-aksi protes. Dalam praktiknya, advokasi lingkungan dapat menjadi suatu bentuk gerakan sosial yang melibatkan berbagai kelompok dan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup. Advokasi lingkungan juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup dan mempengaruhi kebijakan publik untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam pengembangan pembangunan.

Secara keseluruhan, advokasi lingkungan memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga lingkungan hidup dan melindungi alam untuk keberlangsungan hidup manusia. Konsep ini sangat relevan dalam

konteks penelitian ini, di mana aktivis perempuan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah melakukan advokasi lingkungan dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup dan memberikan perhatian khusus pada perspektif ekofeminis dalam aksi-aksinya.

c. Aktivis Perempuan

Aktivis perempuan merupakan perempuan yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan, serta turut serta dalam memperjuangkan isu-isu social dan politik yang berkaitan dengan perempuan dan masyarakat secara umum. Aktivis perempuan bertindak sebagai agen perubahan dalam melawan diskriminasi gender dan mengadvokasi kesetaraan gender. Beberapa definisi aktivis perempuan menurut para ahli antara lain yaitu menurut Jenkins, K (2018) aktivis perempuan adalah perempuan yang secara aktif terlibat dalam memperjuangkan kesetaraan gender, kesejahteraan social, dan keadilan social. Sedangkan menurut Sukanti, S. (2019) dalam jurnal ilmu social dan ilmu politik yang berjudul “Peran Aktivis Perempuan dalam Mengakankan Keadilan Gender” menyebutkan aktivis perempuan adalah orang yang secara sadar dan terus menerus melakukan aksi, kampanye, atau gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengatasi diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat.

d. Penjagaan Lingkungan dalam Islam

Konsep penjagaan lingkungan menurut islam dikenal sebagai *hifdz al-bi'ah*. Konsep ini menunjukkan bahwa umat islam harus menjaga alam dan lingkungan sekitar sebagai tugas yang diberikan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa manusia adalah Khalifah di bumi, yang artinya manusia adalah penguasa bumi yang diberikan Amanah untuk memelihara bumi dan menggunakannya dengan bijaksana. Menurut Jauharatuddini, konsep penjagaan lingkungan dalam islam harus dilakukan dengan cara menghindari tindakan-tindakan yang merusak lingkungan, seperti membakar hutan, mengambil kayu secara berlebihan, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya.

Selain itu, konsep ini juga menekankan pentingnya memperlakukan hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup dengan baik dan bijaksana (Jauharatiddini. 2017)

Menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab umat muslim terhadap bumi yang ditinggali. Di dalam Alquran, terdapat ayat yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 56 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ وَطَمَعًا خَوْفًا إِنَّ رَحْمَتَ رَبِّئِنَّهُ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Yang artinya “ Dan jangan lah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah di luruskan. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sungguh rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S. Al-A'raf. 56). Konsep ini menyatakan bahwa alam semesta di ciptakan oleh Allah SWT, dan manusia memiliki tanggungjawab untuk memelihara bumi serta memanfaatkannya secara bijaksana.

2. Teori Ekofeminisme Vandana Shiva

a. Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva

Ekofeminisme menurut Vandana Shiva (2005) di dasarkan pada pemahaman bahwa degradasi lingkungan hidup dan penindasan perempuan terkait erat dan terjadi sebagai akibat dari eksploitasi yang sama oleh sistem patriarki dan kapitalis. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa perempuan harus berperan penting dalam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup dan menentang praktik-praktik eksploitasi yang merusak bumi. Shiva memandang bahwa prinsip-prinsip kapitalisme seperti pemilikan, kontrol, dan eksplorasi sumber daya alam, serta pemilikan dan kontrol terhadap kehidupan manusia dan biologis yang semestinya bersifat bebas menyebabkan krisis sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Dalam pandangan ekofeminisme Vandana Shiva, penguasaan kapitalisme terhadap sumber daya alam dan kontrol terhadap kehidupan manusia juga berpengaruh pada peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan dan alam dipandang memiliki hubungan yang sama-sama terpinggirkan oleh kapitalisme, dan karenanya ekofeminisme menekankan pentingnya memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat sebagai bagian dari perjuangan advokasi lingkungan. Teori ini dikenal dengan istilah "ekofeminisme dari Selatan", yang berbeda dengan ekofeminisme Barat yang lebih menekankan pada kesetaraan gender dan pembebasan perempuan. Ekofeminisme Vandana Shiva menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan partisipasi perempuan dalam perjuangan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, termasuk melalui pengembangan teknologi alternatif dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang berkelanjutan (Shiva. 2005)

b. Asumsi Dasar Teori Ekofeminisme Vandana Shiva

Asumsi dasar teori ekofeminisme Vandana Shiva (2005) didasarkan pada pemahaman bahwa eksploitasi lingkungan hidup dan penindasan perempuan saling terkait. Menurut Shiva, pandangan dunia patriarki yang mengabaikan nilai-nilai feminin seperti kerja sama, keberlanjutan, dan ketergantungan pada lingkungan hidup, telah memperburuk krisis lingkungan dan sosial yang dihadapi manusia saat ini. Dalam pandangan Shiva, upaya untuk mengatasi masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memberdayakan perempuan dan mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. (Shiva. 2005)

Menurut Vandana Shiva (2005), sistem patriarki dan kapitalis mengakibatkan degradasi lingkungan hidup dan penindasan perempuan terjadi secara bersamaan. Dalam pandangan ini, perempuan dipandang sebagai penjaga alam dan pengatur sumber daya alam yang diperoleh dari alam. Oleh karena itu, pemahaman dan partisipasi perempuan dalam masalah lingkungan dan isu-isu ekologi sangat penting untuk mencapai

keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan manusia (Shiva & Mies. 1993)

c. **Istilah Kunci Teori Ekofeminisme Vandana Shiva**

Konsep kunci dari teori ekofeminisme Vandana Shiva (2005) adalah keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan penindasan terhadap perempuan, serta pentingnya memahami hubungan ini untuk membangun perlawanan terhadap dominasi patriarki dan sistem ekonomi yang merusak lingkungan. Shiva (2005) mengidentifikasi bahwa perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan karena ketergantungan mereka pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga karena peran tradisional mereka dalam menjaga lingkungan. Shiva juga menyoroti pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam lingkungan lokal dan global, termasuk hak atas tanah dan air. Selain itu, Shiva menekankan perlunya mengadopsi pendekatan holistik dalam melihat isu lingkungan dan feminisme, serta membangun solidaritas antara perempuan dan gerakan lingkungan untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih luas (Shiva. 2005)

Dalam teori ekofeminisme Vandana Shiva (2005), ada beberapa konsep kunci yaitu antara lain:

1) Patriarki lingkungan

Konsep ini menunjukkan bahwa sistem patriarki yang mendominasi masyarakat juga mempengaruhi cara kita memandang lingkungan.

2) Kepentingan ganda (*double-burden*)

Konsep ini menggambarkan bagaimana perempuan sebagai anggota masyarakat yang kurang berdaya seringkali mengalami beban ganda akibat dari kesenjangan gender dan lingkungan yang ada.

3) Kekerasan terhadap perempuan dan alam

Konsep ini mengaitkan antara kekerasan dan penindasan yang dialami perempuan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia.

4) Solidaritas ekologis.

Konsep ini menunjukkan pentingnya hubungan timbal balik antara manusia dan alam serta pentingnya solidaritas antar manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan.

5) Pengakuan hak alam

Alam memiliki hak yang sama seperti manusia, sehingga harus diakui dan dilindungi oleh hukum.

6) Pengetahuan lokal.

Konsep ini menekankan pentingnya pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menurut John Creswell (2018) ialah sesuatu proses bertahap atau bersiklus yang didahului dengan mengenali permasalahan ataupun isu yang hendak diteliti. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pandangan Bogdan serta Taylor merupakan prosedur riset yang menciptakan informasi deskriptif berbentuk kata tulisan ataupun lisan dari orang maupun sikap yang bisa diartikan (Suwendra, 2018). Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan Analisis Deskriptif. Sugiyono menjelaskan, deskriptif analisis merupakan sesuatu tata cara yang berperan untuk mendeskripsikan ataupun memberikan cerminan tentang objek yang diteliti lewat informasi yang sudah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melaksanakan analisis serta membuat kesimpulan yang berlaku yang bersifat *universal* (Sugiyono, 2013). Setelah itu informasi yang sudah terkumpul kemudian diolah serta dianalisis untuk mengambil suatu kesimpulan. Oleh karenanya, peneliti menggunakan pendekatan Analisis Deskriptif sebab dirasa sesuai untuk mendapatkan deskripsi ataupun cerminan yang cocok dengan rumusan permasalahan. Jadi, peneliti dapat

menguasai sesuatu fenomena sosiologis yang berkaitan dengan ekofeminisme dan peran aktivis perempuan dalam advokasi lingkungan di Walhi Jawa Tengah.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan seperti observasi dan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini data primer didapatkan dari hasil wawancara yang dilakukan kepada aktivis perempuan di Walhi Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

Data skunder merupakan data yang didapatkan dari studi kepustakaan berbentuk pustaka misalnya terdiri dari sumber atau dokumen yang relevansi dengan penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, serta artikel yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara guna mendapatkan hasil penelitian sesuai berdasarkan pada data-data yang diperoleh di lapangan sehingga penelitian dapat bermanfaat menjadi penemuan baru atau teori baru (Sidiq & Choiri, 2019). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yakni melalui teknik triangulasi data yaitu melalui teknik observasi (pengamatan), Interview (wawancara) dan dokumentasi.

a) Observasi

Dalam penelitian kualitatif observasi dipahami sebagai pengamatan langsung terhadap suatu objek untuk mengetahui, keadaan, kondisi, setting, ruang, serta maknanya pada pengumpulan data suatu penelitian (Ibrahim, 2015). Observasi yakni bagian yang sangat penting dalam

sebuah penelitian kualitatif. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksikan secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Menurut Matthews dan Ross, observasi adalah metode pengumpulan data melalui indera manusia atau disebut dengan cara paling umum untuk memperhatikan subjek dan keadaannya saat ini dan memperhatikan cara berperilaku yang diperhatikan tanpa melihat keadaan normal subjek dengan lingkungan sosialnya (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam penelitian ini observasi dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran kegiatan yang ada di Walhi Jawa tengah dalam membela hak-hak lingkungan.

b) Wawancara

Wawancara ialah metode penggalan informasi melalui percakapan yang dicoba dengan maksud tertentu, dari 2 pihak ataupun lebih (Nugrahani, 2014). Dalam konteks riset kualitatif, wawancara merupakan suatu proses interaksi komunikasi yang dicoba oleh paling tidak 2 orang atas bawah ketersediaan serta dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraannya mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust selaku pendirian utama dalam proses menguasai. (Sidiq & Choiri, 2019). Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada 3 orang aktivis perempuan Walhi Jateng. Alasan pemilihan ketiga informan itu karena keaktifan dan keterlibatana mereka di bidang advokasi lingkungan

c) Dokumentasi

Menurut Mc. Millan dan Schumacer (2001), dokumen ialah rekaman (peristiwa) masa lampau yang ditulis serta dicetak, bisa berbentuk catatan anekdot, buku harian, pesan, serta dokumen-dokumen. Dokumentasi adalah cara paling umum untuk mengumpulkan informasi yang dapat digunakan dengan menggunakan beberapa perangkat untuk mendapatkan informasi data sebagai catatan dan gambar. Menurut Patton (2002) sebagai materi yang disimpan, cenderung sebagai korespondensi atau memorabilia atau arsip sebagai data audiovisual

(Raco, 2010). Adapun dokumen yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan yakni dokumentasi yang berkaitan dengan peran aktivis perempuan dalam advokasi lingkungan di Walhi Jawa Tengah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan informasi, mencari tema ataupun pola dengan iktikad untuk menguasai maknanya (Suwendra, 2018). Teknik analisis yang digunakan dalam riset ini merupakan teknik analisis data kualitatif ialah dengan melaksanakan penekanan dalam menganalisis riset secara mendalam terhadap informasi yang diperoleh dilapangan baik dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga tuntas sampai datanya pada titik jenuh (Sidiq & Choiri, 2019). Menurutnya terdapat tiga serangkaian aktivitas yang dicoba dalam menganalisis informasi atau data. Berikut merupakan tiga langkah dalam menganalisis data:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu membuat ringkasan tentang isi dari catatan data di lapangan. Pada penelitian ini peneliti melakukan seleksi, menyederhanakan semua jenis data. Peneliti menghimpun data sebanyak mungkin terkait data-data dalam kegiatan aktivis perempuan di walhi Jawa Tengah, kemudian data yang telah dihimpun direduksi. Data yang telah dihimpun kemudian diklasifikasi sesuai dengan aspek kajian dalam penelitian ini

b. Sajian Data

Sajian data yakni sejumlah data yang memungkinkan para peneliti guna membuat penentuan tindakan dan mencapai kesimpulan (Nugrahani, 2014). Sajian data akan diatur ataupun disusun sesuai dengan subjek pusat sehingga pemahaman antara bagian-bagiannya

dalam konteks mutlak menjadi sederhana bukan terpisah sehingga dapat merumuskan kesimpulan akhir penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yakni kegiatan pemahaman terhadap interpretasi data dan hasil analisis data. Penarikan simpulan akhir dimulai dengan menyesuaikan tema dan judul penelitian, tujuan, pembahasan dengan disertakan data dan temuan dari hasil analisis data dalam penelitian dan teori ilmu yang relevan. Dengan demikian akan memudahkan peneliti untuk memahami dan menarik kesimpulan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam laporan penelitian ini ditulis dalam enam bagian (bab) yang disusun dengan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II ADVOKASI LINGKUNGAN OLEH PEREMPUAN DAN TEORI EKOFEMINISME.

Bab ini berisi kajian teori serta konsep yang relevan dengan tema objek penelitian. Bab ini berisi 2 sub bab yaitu Advokasi lingkungan oleh perempuan dan Teori Ekofeminisme Vandana Shiva. Pada sub bab pertama menjelaskan tentang advokasi lingkungan, perempuan, dan konsep penjagaan lingkungan dalam islam. Pada sub bab kedua menjelaskan teori ekofeminisme Vandana Shiva meliputi konsep, asumsi dasar dan konsep kunci teori ekofeminisme Vandana Shiva.

BAB III WALHI JAWA TENGAH.

Bab ini terdiri dari 2 sub bab. Sub bab pertama berisi gambaran umum Provinsi Jawa Tengah yang meliputi kondisi geografis dan kondisi demografis. Sub bab kedua berisi profil Walhi Jateng yang meliputi sejarah terbentuknya,

visi-misi, nilai-nilai dasar organisasi, dan prinsip-prinsip organisasi Walhi Jawa Tengah.

BAB IV UPAYA PENDAMPINGAN YANG DILAKUKAN OLEH AKTIVIS PEREMPUAN WALHI DAN ALASANNYA.

Bab ini terdapat 2 sub bab. Sub bab pertama memaparkan dan menganalisis upaya pendampingan yang dilakukan oleh aktivis perempuan Walhi Jateng. Sub bab 2 memaparkan dan menganalisis alasan dilakukannya pendampingan.

BAB V DAMPAK DILAKUKANNYA PENDAMPINGAN OLEH AKTIVIS PEREMPUAN WALHI JAWA TENGAH.

Bab ini akan memaparkan dampak dilakukannya pendampingan lingkungan oleh aktivis perempuan Walhi Jateng. Dampak tersebut meliputi dampak lingkungan, dampak sosial dan dampak ekonomi.

BAB VI PENUTUP.

Bab ini terdiri dari dua sub bab yakni kesimpulan dan saran.

BAB II

ADVOKASI LINGKUNGAN OLEH PEREMPUAN DAN TEORI EKOFEMINISME

A. Advokasi Lingkungan Oleh Perempuan

1. Advokasi Lingkungan

Advokasi adalah proses yang dilakukan untuk memperjuangkan suatu tujuan atau kepentingan tertentu dengan cara mempengaruhi kebijakan, opini public, atau perilaku masyarakat. Menurut Suryana (2013), advokasi adalah proses atau upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan tertentu dengan cara mengumpulkan dukungan dari masyarakat, mengadakan kampanye, melakukan lobi, dan aksi-aksi lainnya. Advokasi melibatkan upaya komunikasi mobilisasi, dukungan, dan penggunaan berbagai strategi untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Sedangkan lingkungan adalah seluruh elemen fisik, hayati, dan sosial yang ada di sekitar manusia meliputi air, tanah, udara, dan flora fauna yang mempengaruhi kehidupan manusia. Menurut Otto Soemarwoto dalam buku *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan* menjelaskan lingkungan adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad renik bersama dengan benda hidup dan tidak hidup didalamnya yang menempati ruang tertentu.

Advokasi lingkungan adalah upaya untuk membela dan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan atau degradasi akibat kegiatan manusia. Tujuan dari advokasi lingkungan adalah untuk menciptakan kesadaran dan aksi nyata yang mengarah pada perlindungan lingkungan hidup. Advokasi lingkungan dapat dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi, dan meliputi berbagai strategi, termasuk kampanye, aksi protes, pengawasan kebijakan, penelitian, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut C. Esteban (1997), advokasi lingkungan adalah suatu upaya yang sistematis dan berkelanjutan dalam melobi, mempengaruhi, mengatur, dan memobilisasi kekuatan sosial untuk mencapai tujuan bersama dalam perjuangan lingkungan.

Definisi-definisi di atas menunjukkan bahwa advokasi merupakan upaya untuk memperjuangkan hak, kepentingan, atau tujuan tertentu melalui kegiatan yang

terorganisir dan sistematis. Advokasi dapat dilakukan oleh individu atau kelompok masyarakat dalam memperjuangkan hak dan kepentingan tertentu dengan cara mengumpulkan dukungan dari masyarakat, mengadakan kampanye, melakukan lobi, dan aksi-aksi lainnya. Tujuan utama dari advokasi adalah untuk mencapai perubahan sosial yang positif dan memperjuangkan hak-hak yang telah dijamin oleh undang-undang. Dalam konteks penelitian ini, advokasi lingkungan digunakan sebagai kerangka teori yang mengacu pada upaya advokasi atau advokasi yang dilakukan oleh aktivis lingkungan dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup. Konsep advokasi lingkungan juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan perlunya kebijakan publik yang mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Advokasi lingkungan juga dianggap sebagai strategi yang efektif dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup, yaitu hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat, aman, dan lestari. Upaya advokasi lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti melakukan kampanye sosial, mengajukan gugatan hukum, dan mengorganisir aksi-aksi protes. Dalam praktiknya, advokasi lingkungan dapat menjadi suatu bentuk gerakan sosial yang melibatkan berbagai kelompok dan organisasi yang memiliki kepentingan yang sama dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan hidup. Advokasi lingkungan juga dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan hidup dan mempengaruhi kebijakan publik untuk lebih memperhatikan aspek lingkungan dalam pengembangan pembangunan.

Secara keseluruhan, advokasi lingkungan memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran masyarakat tentang perlunya menjaga lingkungan hidup dan melindungi alam untuk keberlangsungan hidup manusia. Konsep ini sangat relevan dalam konteks penelitian ini, di mana aktivis perempuan Wahana Lingkungan Hidup Jawa Tengah melakukan advokasi lingkungan dalam memperjuangkan hak lingkungan hidup dan memberikan perhatian khusus pada perspektif ekofeminis dalam aksi-aksinya.

2. Perempuan

Pengertian perempuan dapat dilihat dari sudut pandang fisik dan psikis. Dari sudut pandang fisik didasarkan pada struktur biologis komposisi dan perkembangan unsur-unsur kimia tubuh. Sedangkan menurut sudut pandang psikis didasarkan pada sifat, maskulinitas atau feminitas. Perempuan dalam konteks psikis atau gender didefinisikan sebagai sifat yang melekat pada seseorang untuk menjadi feminisme. Sedangkan perempuan dalam pengertian fisik merupakan salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh alat reproduksi berupa rahim, sel telur dan payudara sehingga perempuan dapat hamil, melahirkan dan menyusui. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa perempuan berarti jenis kelamin yaitu orang atau manusia yang memiliki rahim, mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui. Menurut Nugroho (2008) disebutkan bahwa perempuan merupakan manusia yang memiliki alat reproduksi, seperti rahim, dan saluran untuk melahirkan, mempunyai sel telur, memiliki vagina dan mempunyai alat untuk menyusui, yang semuanya secara permanen tidak berubah dan mempunyai ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat (Ketentuan Tuhan). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan adalah wanita yang mengandung daya tarik kecantikan dan memiliki sifat keibuan yang telah mencapai usia dewasa dan telah dapat memiliki kematangan secara emosi dan afeksi serta memiliki sifat-sifat khas kewanitaan.

Aktivistis perempuan merupakan perempuan yang bergerak dalam memperjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan, serta turut serta dalam memperjuangkan isu-isu sosial dan politik yang berkaitan dengan perempuan dan masyarakat secara umum. Aktivistis perempuan bertindak sebagai agen perubahan dalam melawan diskriminasi gender dan mengadvokasi kesetaraan gender. Beberapa definisi aktivis perempuan menurut para ahli antara lain yaitu menurut Jenkins, K (2018) aktivis perempuan adalah perempuan yang secara aktif terlibat dalam memperjuangkan kesetaraan gender, kesejahteraan sosial, dan keadilan sosial. Sedangkan menurut Sukanti, S. (2019) dalam jurnal ilmu sosial dan ilmu politik yang berjudul "Peran Aktivistis Perempuan dalam Mengakankan Keadilan Gender" menyebutkan aktivis perempuan adalah orang yang secara sadar dan terus

menerus melakukan aksi, kampanye, atau gerakan untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan mengatasi diskriminasi gender yang terjadi di masyarakat.

Teori aktivis perempuan mencakup konsep bahwa perempuan berperan penting dalam perjuangan lingkungan hidup karena mereka secara historis memiliki keterlibatan yang lebih besar dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan. Konsep ini memandang bahwa perempuan seringkali mengalami dampak lebih besar dari kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, terutama di daerah yang bergantung pada sumber daya alam untuk penghidupan mereka. Oleh karena itu, melibatkan perempuan dalam gerakan lingkungan hidup dapat memperkuat keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Beberapa konsep kunci yang terkait dengan teori aktivis perempuan antara lain:

- Gender dan lingkungan: konsep ini mengasumsikan bahwa peran gender memainkan peran penting dalam cara orang berinteraksi dengan lingkungan, serta bahwa perempuan seringkali lebih rentan terhadap dampak lingkungan yang merugikan.
- Partisipasi dan pengaruh: konsep ini menyoroti pentingnya melibatkan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan lingkungan. Aktivis perempuan seringkali memainkan peran kunci dalam advokasi dan advokasi lingkungan, serta dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi perubahan sosial.
- Gerakan sosial dan keterlibatan: konsep ini menyoroti pentingnya gerakan sosial dalam mencapai tujuan lingkungan hidup, serta peran perempuan dalam gerakan ini. Aktivis perempuan seringkali

3. Ekofeminisme

Ekofeminisme adalah suatu paham tentang keterkaitan antara perempuan dan alam semesta terutama dalam hal ketidakberdayaan dan ketidakadilan perlakuan kepada keduanya. Ekofeminisme menganggap bahwa kesetaraan gender dan kelestarian lingkungan merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dan saling mempengaruhi. Pandangan ini mengkritik dan menolak diskriminasi gender, serta menentang

penghancuran lingkungan dan eksploitasi sumberdaya alam yang tidak berkelanjutan. Ekofeminisme juga mempromosikan keterlibatan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak lingkungan dan memberikan kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.

Istilah ekofeminisme pertama kali dicetuskan oleh Françoise d'Eaubonne dalam bukunya yang berjudul *Feminisme ou la Mort* (1974) atau dalam Bahasa Indonesia yang berarti Feminis dan Kematian. Françoise dalam bukunya menjelaskan tentang ketidakadilan yang terjadi antara perempuan dan alam. Ia juga menjelaskan hubungan antara perempuan dan alam yang setara, sehingga kaum feminis menyetujui dan memberikan sikap positif tentang pemikiran tersebut. Françoise juga memberikan solusi dengan membuat sketsa ide-ide baru tentang cara mengatur masyarakat berdasarkan kesetaraan gender, pelestarian alam, dan kesetaraan masyarakat yang ia sebut sebagai “kesetaraan dalam keragaman, bukan perbedaan”. Feminisme Françoise bukan hanya gerakan pembebasan tetapi juga krisis kemanusiaan yang akan mengubah dasar tatanan kehidupan menjadi seimbang.

Ekofeminisme berbicara tentang adanya ketidakadilan di dalam masyarakat terhadap perempuan. Ketidakadilan terhadap perempuan dalam lingkungan ini berangkat dari pengertian adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh manusia terhadap non manusia atau alam. Karena perempuan selalu dihubungkan dengan alam maka secara konseptual, simbolik dan linguistic ada keterkaitan antara isu feminis dan ekologis. Menurut Karen J Warren (2022) mengatakan bahwa keterkaitan tersebut tidak mengherankan mengingat bahwa masyarakat kita dibentuk oleh nilai, kepercayaan, pendidikan, tingkah laku yang memakai kerangka kerja patriarki, dimana ada justifikasi hubungan dominasi dan subordinasi, penindasan terhadap perempuan oleh laki-laki.

Menurut Dr. Ika Saridewi dalam jurnal “Ekofeminisme: Kritik atas Dominasi Patriarki terhadap Perempuan dan Lingkungan” menyatakan bahwa ekofeminisme adalah Gerakan social dan politik yang menghubungkan antara kekerasan terhadap alam dan kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak dari dominasi patriarki. Ekofeminisme menekankan pentingnya memperjuangkan keberlanjutan lingkungan dan hak perempuan secara bersamaan serta mengeksplorasi hubungan yang kompleks

antar keduanya. Ekofeminisme juga menekankan perlunya pengakuan terhadap nilai-nilai yang diabaikan dalam kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan serta peran perempuan dalam mengatasi masalah lingkungan. Konsep ekofeminisme memiliki implikasi yang signifikan bagi perjuangan lingkungan dan perempuan. Ia memperkuat peran perempuan dalam memperjuangkan hak lingkungan dan membantu untuk memperbaiki hubungan antara perempuan dan lingkungan. Konsep ini akan digunakan sebagai teori dasar dalam penelitian ini untuk menjelaskan peran aktivis perempuan dalam advokasi lingkungan

4. Penjagaan lingkungan dalam Islam

Konsep penjagaan lingkungan menurut islam dikenal sebagai *hifdz al-bi'ah* (melestarikan lingkungan hidup). Konsep ini menunjukkan bahwa umat islam harus menjaga alam dan lingkungan sekitar sebagai tugas yang diberikan oleh Allah SWT. Menurut Yusuf al-Qaradhawi pemeliharaan lingkungan inhern dengan perintah menjaga agama. Dengan kata lain, merusak lingkungan hidup sama halnya menentang perintah agama. Dalam Al-Qur'an, Allah menjelaskan bahwa manusia adalah Khalifah di bumi, yang artinya manusia adalah pemimpin bumi yang diberikan Amanah untuk memelihara bumi dan menggunakannya dengan bijaksana.

Menurut Jauharatuddini, konsep penjagaan lingkungan dalam islam harus dilakukan dengan cara menghindari tindakan-tindakan yang merusak lingkungan, seperti membakar hutan, mengambil kayu secara berlebihan, membuang sampah sembarangan, dan lain sebagainya. Selain itu, konsep ini juga menekankan pentingnya memperlakukan hewan, tumbuhan, dan seluruh makhluk hidup dengan baik dan bijaksana (Jauharatiddini. 2017)

Menjaga lingkungan juga merupakan bagian dari tanggung jawab umat muslim terhadap bumi yang ditinggali. Di dalam Alquran, terdapat ayat yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 56 :

Yang artinya “ Dan jangan lah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah di luruskan. Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan harap. Sungguh rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”(Q.S. Al-A'raf. 56). Konsep ini menyatakan bahwa alam semesta di ciptakan oleh Allah SWT, dan

manusia memiliki tanggungjawab untuk memelihara bumi serta memanfaatkannya secara bijaksana.

B. Teori Ekofeminisme Vandana Shiva

1. Konsep Ekofeminisme Vandana Shiva

Menurut Vandana Shiva Ekofeminisme adalah gerakan social dan politik yang memadukan advokasi lingkungan dengan perjuangan hak perempuan, serta memandang lingkungan sebagai ruang hidup bersama untuk semua makhluk hidup. Ekofeminisme Vandana Shiva di dasarkan pada pemahaman bahwa degradasi lingkungan hidup dan penindasan perempuan terkait erat dan terjadi sebagai akibat dari eksploitasi yang sama oleh sistem patriarki dan kapitalis. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa perempuan harus berperan penting dalam upaya untuk melestarikan lingkungan hidup dan menentang praktik-praktik eksploitasi yang merusak bumi. Shiva memandang bahwa prinsip-prinsip kapitalisme seperti kepemilikan, kontrol, dan eksplorasi sumber daya alam, serta kepemilikan dan kontrol terhadap kehidupan manusia dan biologis yang semestinya bersifat bebas menyebabkan krisis sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan.

Vandana Shiva merupakan seorang aktivis lingkungan yang diakui secara internasional yang lahir pada 5 November 1952 di Dehradun Uttarakhand, India. Shiva dilahirkan dari lingkungan keluarga yang hidupnya memiliki kedekatan dan menggantungkan pada alam. Pekerjaan ke dua orang tuanya berkaitan langsung dengan cara pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian lingkungan. Ayahnya bernama Rajuji sebagai seorang konservator hutan sedangkan ibunya seorang petani. Perhatian terhadap alam dan lingkungan hidup sudah mulai tertanam sejak di lingkungan keluarga. Keluarga memiliki kontribusi besar dalam pembentukan watak dan karakter Shiva menjadi seorang yang peduli terhadap kelestarian alam.

Mahatma Gandhi memiliki pengaruh besar bagi Shiva dalam mengembangkan gerakan politik lingkungan tanpa kekerasan. Politik anti kekerasan tidak hanya diterapkan dalam relasi dengan sesama manusia tetapi juga terhadap semua makhluk yang ada di alam. Pandangan Gandhi yang menyatakan “alam menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia secara cukup, tetapi tidak cukup untuk

memenuhi beberapa orang yang rakus” menjadi fondasi bagi pemikiran Shiva dalam mengembangkan demokrasi alam di bidang ekonomi maupun politik (Shiva, 2005: 13). Sikap rakus merupakan awal mula munculnya kekerasan terhadap sesama maupun alam. Mengembangkan demokrasi alam harus dimulai dengan mengubah sikap, karakter, dan pola pikir manusia dari yang rakus ke pola hidup sederhana. Pengaruh Gandhi nampak pada saat Shiva memimpin gerakan Chipko yang berjuang menyelamatkan hutan pada tahun 1970. Gagasan politik anti kekerasan Gandhi memberi inspirasi terhadap arah perjuangan penyelamatan lingkungan hidup di sektor kehutanan. Gerakan Chipko merupakan model perlawanan perempuan India terhadap ancaman perusakan hutan dan perampasan hak-hak perempuan. Perempuan melakukan aksi memeluk pohon untuk melindungi dari laju Bulldozer yang akan menumbangkannya. Perempuan tidak melakukan aksi anarkhis merusak sarana yang akan dipergunakan untuk menumbangkan pohon, melainkan dengan cara mengetuk nurani para eksekutor lapangan maupun pengambil kebijakan untuk mengurungkan niatnya menumbangkan pepohonan yang berada di hutan.

Ilmu pengetahuan dalam perspektif pemikiran Shiva tidak pernah dapat lepas dari adanya kepentingan. Aktivitas kegiatan ilmiah tidak bersifat bebas nilai. Pandangan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat objektif, netral dan universal hanyalah merupakan mitos yang tidak dapat dibuktikan secara empirik (Shiva, 1998:19-30). Dibalik aktivitas kegiatan ilmiah terdapat kepentingan terselubung yang terkadang bernilai baik, adakalanya juga bernilai buruk. Ideologisasi ilmu muncul dari sejak tahap proses persiapan, pembentukan sampai dengan penerapan di masyarakat.

Shiva menyadari pemahaman tentang alam semesta tidak semata-mata hanya dapat didekati secara sektoral dengan menggunakan satu disiplin ilmu. Cara pandang terhadap lingkungan dirasa tidak memadai apabila menggunakan pendekatan mono-dimensional. Kehidupan yang ada di alam semesta sangat kompleks dan kaya akan makna, sehingga perlu diteliti dengan menggunakan berbagai macam disiplin ilmu serta melibatkan ilmuwan lintas bidang studi. Alam menyimpan berbagai misteri yang menarik untuk dipahami secara lebih mendalam

dan komprehensif. Alam merupakan rangkaian sistem yang bersifat kompleks sehingga supaya dapat memahami secara lebih utuh memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai bidang ilmu. Untuk itulah Shiva mengembangkan wawasan pengetahuan dengan cara melakukan penelitian lintas disiplin meliputi bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebijakan lingkungan di Institute of Science dan Indian Institute of Management di Bangalore.

Hasrat intelektual untuk melakukan kajian secara lebih mendalam, lintas bidang ilmu dan komprehensif berlanjut dengan mendirikan lembaga *Research Foundation for Science, Technology and Ecology*. Lembaga ini bertujuan mengembangkan sintesis harmonis antara ilmu, teknologi serta ekologi yang merupakan aspek penting mendasari kehidupan dan kesejahteraan manusia. Pada tahun 1991 Shiva mendirikan organisasi nasional bernama Navdanya yang tujuannya melindungi keanekaragaman hayati, integritas sumber daya hidup dan perjuangan petani lokal dalam hal mengembangkan benih asli. Shiva bersikap kritis terhadap berbagai kebijakan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, keanekaragaman hayati, bioteknologi, bioetika, rekayasa genetika yang berpotensi merugikan kaum perempuan dan alam. Misi utamanya adalah mencegah imperialisme dan komersialisasi terhadap kehidupan yang ada di alam semesta.

Shiva tidak hanya berjuang di tingkat lokal, tetapi juga di forum nasional bahkan di dunia internasional. Shiva mengembangkan jejaring sosial untuk menjadikan penindasan terhadap alam dan perempuan sebagai musuh bersama. Usaha membebaskan perempuan dari belenggu penindasan dan gerakan melestarikan alam memerlukan komitmen moral dari semua pihak. Perjuangan penyelamatan lingkungan dirasa akan lebih efektif apabila menjadi komitmen bersama semua manusia, mengatasi batas wilayah suatu Negara. Shiva banyak membantu organisasi kemasyarakatan di Afrika, Asia, Amerika Latin, Irlandia, Swiss, dan Austria dengan cara melakukan kampanye melawan rekayasa genetika. Pada tanggal 1-2 Mei 1998 Shiva di Bratislava Slovakia memobilisasi pergerakan internasional perempuan dalam hal membangun kesadaran kritis terkait dengan persoalan di bidang pangan, pertanian, hak paten, dan bioteknologi. Gerakan tersebut diberi nama dengan *Diverse Women for Diversity* (Indah : 2007:63).

Vandana Shiva merupakan tokoh ekofeminis yang produktif dalam mengungkapkan gagasannya secara tertulis. Sudah lebih dari 13 buku dan 300 makalah ilmiah maupun filsafat berhasil dipublikasikan di forum regional, nasional maupun internasional. Buku maupun makalah ilmiah yang dihasilkan dari pemikiran Shiva banyak membahas tentang persoalan lingkungan, kependudukan, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan teknologi dikaitkan dengan dampaknya terhadap kehidupan manusia terutama kaum perempuan. Buku berjudul *Ecofeminism* (1993) di Indonesiakan dengan judul *Ecofeminism Perspektif Gerakan Perempuan & Lingkungan* (2005) dikarang bersama Maria Mies, Vandana Shiva banyak membahas dampak negatif dari ilmu pengetahuan yang bersifat reduksionis serta kebijakan pembangunan yang bercorak patriarkhi memunculkan kekerasan terhadap perempuan dan alam (hutan). Ilmu pengetahuan reduksionis mengakibatkan perempuan terasing dalam menjalankan fungsi produksi maupun reproduksi terhadap kehidupan manusia maupun alam. Kebijakan pembangunan yang patriarkhi membuat perempuan dan anak-anak menjadi semakin bertambah miskin. Shiva mengkritik kebijakan pembangunan baik dalam skala global (internasional) maupun nasional yang salah arah dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap perempuan dan alam. Perempuan menjadi tuna wisma di negaranya sendiri dan alam banyak teracuni oleh limbah-limbah yang berbahaya (Shiva, 2005:92, 113).

Pada tahun 1988, Shiva menerbitkan buku berjudul *Staying Alive: Women, Ecology and Survival on India* (1988) diindonesiakan dengan judul *Bebas dari Pembangunan Perempuan, Ekologi dan Perjuangan Hidup di India* (1997) merupakan hasil refleksi dari pengalaman empiriknya ketika bergabung dengan perempuan India berjuang untuk mempertahankan kelestarian hutandan kelangsungan hidup. Diterbitkannya buku tersebut diilhami oleh penderitaan dan pandangan perempuan yang berjuang untuk mempertahankan dan melestarikan kehidupan; serta perjuangan perempuan mempersoalkan secara kritis arti sebuah kemajuan, ilmu pengetahuan dan pembangunan yang menghancurkan dan mengancam kelangsungan hidup. Hutan akan lestari dan perempuan akan memperoleh hak secara adil apabila kebijakan pembangunan pada umumnya dan

disektor ke hutan pada khususnya menghidupkan kembali prinsip feminitas (*Tera Mater*) (Shiva, 1997: 276). Dalam buku ini, Shiva menguraikan analisisnya tentang hubungan antara perempuan, lingkungan, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Dia menyoroti peran khusus perempuan dalam pelestarian lingkungan dan ekologi, serta dampak negatif yang dialami perempuan akibat praktik-praktik ekonomi yang merusak alam. Shiva mengembangkan gagasan-gagasan ekofeminisme yang mencakup konsep-konsep seperti kekerasan terhadap perempuan dan alam, penindasan perempuan dan penghancuran lingkungan, serta pentingnya mengakui pengetahuan lokal dan tradisi perempuan dalam mencapai keberlanjutan lingkungan.

Dalam pandangan ekofeminisme Vandana Shiva, penguasaan kapitalisme terhadap sumber daya alam dan kontrol terhadap kehidupan manusia juga berpengaruh pada peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan dan alam dipandang memiliki hubungan yang sama-sama terpinggirkan oleh kapitalisme, dan karenanya ekofeminisme menekankan pentingnya memperbaiki posisi perempuan dalam masyarakat sebagai bagian dari perjuangan advokasi lingkungan. Teori ini dikenal dengan istilah "ekofeminisme dari Selatan", yang berbeda dengan ekofeminisme Barat yang lebih menekankan pada kesetaraan gender dan pembebasan perempuan. Ekofeminisme Vandana Shiva menekankan pentingnya keterlibatan aktif dan partisipasi perempuan dalam perjuangan untuk memperbaiki kondisi lingkungan, termasuk melalui pengembangan teknologi alternatif dan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang berkelanjutan (Shiva. 2005)

2. Asumsi Dasar Teori Ekofeminisme Vandana Shiva

Asumsi dasar teori ekofeminisme Vandana Shiva didasarkan pada pemahaman bahwa eksploitasi lingkungan hidup dan penindasan perempuan saling terkait. Menurut Shiva, pandangan dunia patriarki yang mengabaikan nilai-nilai feminin seperti kerja sama, keberlanjutan, dan ketergantungan pada lingkungan hidup, telah memperburuk krisis lingkungan dan sosial yang dihadapi manusia saat ini. Shiva mempelajari cara kerja dan dampak negatif sistem kapitalisme patriarkhi terhadap masyarakat India. Analisis secara rinci terkait dengan ciri, latar belakang, sifat,

karakter, cara kerja dari sistem ekonomi kapitalis-patriarki dilakukan dengan tujuan untuk semakin mengeksplicitkan sekaligus mempromosikan visi baru sistem ekonomi berbasis kehidupan dan berpihak pada kesetaraan gender berpijak pada kearifan local masyarakat India. Dalam pandangan Shiva, upaya untuk mengatasi masalah lingkungan tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk memberdayakan perempuan dan mendorong transformasi menuju masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. (Shiva. 2005).

Berhadapan dengan fakta yang dihadapi di lapangan, Shiva mengambil dua langkah: pertama melakukan kritik terhadap berbagai fenomena sosial-ekonomi-kultural di masyarakat yang berpotensi memunculkan ketidakadilan gender maupun kerusakan lingkungan. Berbagai bentuk penindasan baik yang dilakukan secara halus maupun kasar berusaha dibongkar dan diungkap asumsi–asumsi yang mendasarinya. Langkah kedua, Shiva berusaha menarik konsepsi umum bertolak dari fakta yang ditemui, dirasakan, diperoleh di lapangan untuk kemudian dirumuskan dengan visi baru yang dipandang lebih baik. Proses generalisasi ditempuh setelah melakukan analisis pengamatan secara memadai.

Fakhri berpendapat konsep ekofeminisme yang dikembangkan oleh Shiva merupakan hasil reaksi kritis terhadap pemikiran feminis sebelumnya. Pemikiran Shiva berangkat dari keprihatinan semakin disingkirkannya ideologi femininitas dalam kehidupan masyarakat umum maupun dikalangan feminis sendiri. Perkembangan pemikiran feminis didominasi oleh prinsip maskulinitas produk tradisi pemikiran Barat. Gerakan feminisme yang seharusnya melakukan pembelaan terhadap ideologi femininitas justru menggunakan prinsip maskulinitas sebagai dasar gerakannya. Hampir semua pemikiran feminisme tanpa sadar mengambil oper ideologi, epistemologi, dan teori maskulinitas yang bersifat anti ekologi, berwatak rasionalis serta memisahkan dengan hal-hal yang bersifat spiritual. Pandangan Shiva penuh dengan dimensi spiritualitas dalam memandang alam secara feminis (Fakhri, 1997: 22-23).

Vandana Shiva menggugah kesadaran masyarakat modern akan pentingnya dihidupkan kembali kualitas nilai-nilai femininitas. Nilai merupakan unsur penting bagi pembentukan ideologi. Nilai-nilai femininitas dan maskulinitas membentuk

ideologi yang saling berlawanan. Dua ideologi tersebut berpengaruh dalam pengembangan pola pikir manusia dalam relasi secara personal maupun pengambilan kebijakan public yang akan berdampak secara struktural. Nilai-nilai femininitas bercirikan kedamaian, keselamatan, kasih, dan kebersamaan kontras dengan nilai-nilai maskulinitas yang bercirikan persaingan, dominasi, eksploitasi, dan penindasan. Pengembangan nilai-nilai femininitas mengarah pada budaya kehidupan sedangkan pengembangan nilai-nilai maskulinitas mengarah pada budaya penghancuran (Fakhih, 1997:22). Shiva mengajak semua manusia untuk bangkit melestarikan dan menghidupi nilai-nilai femininitas supaya kerusakan alam dapat dicegah dan ketidakadilan terhadap perempuan dapat dihentikan

3. Istilah Kunci Teori Ekofeminisme Vandana Shiva

Konsep kunci dari teori ekofeminisme Vandana Shiva adalah keterkaitan antara kerusakan lingkungan dan penindasan terhadap perempuan, serta pentingnya memahami hubungan ini untuk membangun perlawanan terhadap dominasi patriarki dan sistem ekonomi yang merusak lingkungan. Shiva mengidentifikasi bahwa perempuan seringkali berada dalam posisi yang lebih rentan terhadap dampak kerusakan lingkungan karena ketergantungan mereka pada sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga karena peran tradisional mereka dalam menjaga lingkungan. Shiva juga menyoroti pentingnya memperjuangkan hak-hak perempuan dalam lingkungan lokal dan global, termasuk hak atas tanah dan air. Selain itu, Shiva menekankan perlunya mengadopsi pendekatan holistik dalam melihat isu lingkungan dan feminisme, serta membangun solidaritas antara perempuan dan gerakan lingkungan untuk menciptakan transformasi sosial yang lebih luas (Shiva. 2005)

Dalam teori ekofeminisme Vandana Shiva, ada beberapa konsep kunci yaitu antara lain:

a. Patriarki lingkungan

Konsep ini menunjukkan bahwa sistem patriarki yang mendominasi masyarakat juga mempengaruhi cara kita memandang lingkungan. Patriarki lingkungan ini melibatkan pengambilan keputusan yang didominasi oleh

laki-laki, yang cenderung mengabaikan kepentingan perempuan dan lingkungan. Patriarki lingkungan juga muncul dalam bentuk pemikiran yang memisahkan manusia dari alam dan meremehkan nilai dan kepentingan lingkungan. System patriarki dan kapitalis memiliki dampak yang merusak terhadap lingkungan alam. Konsep ini menyoroti bagaimana struktur dominasi dan ketidakadilan gender yang terkait dengan patriarki berdampak negatif pada ekosistem dan keseimbangan ekologis.

Menurut Vandana Shiva patriarki lingkungan terjadi ketika kekuasaan dan kontrol yang didominasi oleh laki-laki dan digunakan untuk mengeksploitasi alam dengan cara yang tidak berkelanjutan dan merusak. Hal ini tercermin dalam pola penggunaan sumber daya yang berlebihan, degradasi lingkungan, dan penyalahgunaan teknologi yang berdampak negative pada keberlanjutan ekosistem. Salah satu contoh patriarki lingkungan yang sering dibahas oleh Shiva adalah praktik monokultur pertanian yang didorong oleh industry agribisnis modern. Praktik ini didasarkan pada logika keuntungan ekonomi dan dominasi yang mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Monokultur pertanian mengurangi keanekaragaman hayati, merusak tanah dan air, serta meningkatkan penggunaan pestisida dan pupuk kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan.

Selain itu, Vandana Shiva juga menyoroti bahwa dalam konteks patriarki lingkungan, perempuan seringkali menjadi korban yang paling terdampak. Mereka sering mengalami kerugian ekonomi, social, dan kesehatan akibat degradasi lingkungan, kehilangan akses terhadap sumber daya alam, dan terpapar bahan kimia berbahaya. Pada saat yang sama, perempuan juga seringkali menjadi garda terdepan dalam melawan eksploitasi lingkungan dan memperjuangkan keberlanjutan. Dalam teori ekofeminisme Vandana Shiva, pembebasan perempuan dan pembebasan alam saling terkait. Untuk mencapai keberlanjutan ekologis dan keadilan gender, perlu ada transformasi struktur dominasi patriarki yang ada dalam sistem ekonomi dan politik. Hal ini melibatkan pengakuan dan penguatan peran perempuan

dalam pengambilan keputusan, akses yang setara terhadap sumber daya alam, serta pemulihan pengetahuan dan praktik berkelanjutan yang dimiliki oleh komunitas lokal dan perempuan.

Vandana Shiva menekankan perlunya mengembangkan paradigma baru yang lebih berkelanjutan dan adil. Paradigma ini melibatkan penilaian ulang terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam sistem ekonomi dan sosial yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi tak terbatas, konsumsi berlebihan, dan dominasi manusia terhadap alam. Pengakuan akan pentingnya kerjasama dengan alam, sikap hormat terhadap keberagaman hayati, serta peran perempuan sebagai pelindung

b. Kepentingan ganda

Konsep ini menggambarkan bagaimana perempuan sebagai anggota masyarakat yang kurang berdaya seringkali mengalami beban ganda akibat dari kesenjangan gender dan lingkungan yang ada. Dalam konteks lingkungan, perempuan seringkali menjadi pengelola sumber daya alam dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi mereka juga mengalami dampak paling buruk dari kerusakan lingkungan. Vandana Shiva berpendapat bahwa perempuan sering kali secara historis bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti air, tanah, dan pangan. Mereka memiliki pengetahuan tradisional dan praktik berkelanjutan yang telah diwariskan secara turun temurun. Namun, dalam konteks pembangunan yang didominasi oleh nilai-nilai patriarki dan kapitalis, peran dan kepentingan perempuan sering diabaikan atau dianggap remeh.

Dalam teori ekofeminisme Vandana Shiva, kepentingan ganda perempuan terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Perempuan tidak hanya memiliki kepentingan pribadi dalam menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi diri mereka dan keluarga mereka, tetapi juga memiliki kepentingan kolektif dalam menjaga keseimbangan ekologis bagi keberlanjutan masyarakat dan planet. Konsep kepentingan ganda ini menggarisbawahi pentingnya mengakui dan menghargai pengetahuan lokal

dan praktik berkelanjutan yang dimiliki oleh perempuan. Shiva menekankan bahwa pengetahuan perempuan tentang pemeliharaan lingkungan dan praktik berkelanjutan harus dianggap sebagai aset berharga dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini membutuhkan pengakuan terhadap kearifan lokal dan tradisional, serta peran aktif perempuan dalam pengambilan keputusan dan advokasi lingkungan.

Dalam konteks advokasi lingkungan, kepentingan ganda perempuan menginformasikan pendekatan yang holistik dan inklusif. Perempuan dapat memberikan perspektif unik dan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara manusia dan alam, serta implikasinya terhadap kesejahteraan manusia dan lingkungan. Dengan memperkuat peran perempuan dan mengakui kepentingan ganda mereka, advokasi lingkungan dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif dalam menjaga keberlanjutan. Dalam praktiknya, konsep kepentingan ganda mempengaruhi upaya ekofeminis dalam memperjuangkan keadilan gender dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini melibatkan pemberdayaan perempuan, pengakuan pengetahuan lokal dan praktik berkelanjutan yang dimiliki oleh perempuan, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan lingkungan melibatkan partisipasi aktif dan perspektif perempuan.

c. Kekerasan terhadap perempuan dan alam

Konsep ini mengaitkan antara kekerasan dan penindasan yang dialami perempuan dengan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat aktivitas manusia. Kekerasan terhadap perempuan dan alam dipandang sebagai dua sisi dari masalah yang sama, yaitu pengeksploitasi sumber daya secara berlebihan dan tidak bertanggungjawab. Shiva berpendapat bahwa pola kekerasan yang dialami oleh perempuan dalam masyarakat patriarki juga tercermin dalam perlakuan yang merusak terhadap alam.

Shiva mengidentifikasi beberapa bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan alam. Pertama, kekerasan terhadap perempuan meliputi pemerkosaan, kekerasan domestik, eksploitasi ekonomi, dan peminggiran perempuan dari pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan.

Perempuan seringkali menjadi korban dalam konteks konflik sumber daya, pengusuran paksa, dan degradasi lingkungan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kedua, kekerasan terhadap alam terjadi melalui praktik-praktik yang merusak dan eksploitatif terhadap lingkungan. Misalnya, ekstraksi sumber daya alam yang berlebihan, deforestasi, polusi air dan udara, serta penggunaan pestisida beracun. Praktik-praktik ini memperburuk perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Shiva menekankan bahwa ada keterkaitan antara kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap alam. Dia berpendapat bahwa sistem patriarki dan kapitalis yang dominan cenderung memperlakukan perempuan dan alam sebagai objek yang dapat dikuasai, dieksploitasi, dan diperas untuk keuntungan ekonomi yang singkat. Pandangan ini memunculkan sikap dominasi, penghancuran, dan pemisahan yang merugikan baik perempuan maupun alam. Dalam teori ekofeminisme, perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan alam menjadi penting. Shiva mengusulkan bahwa perempuan harus berperan sebagai pelindung lingkungan dan memperjuangkan keberlanjutan. Dia mengajukan pendekatan berbasis kehidupan yang berkelanjutan dan adil, di mana perempuan dan komunitas lokal memiliki akses, kendali, dan penguasaan terhadap sumber daya alam.

Selain itu, Shiva juga menyoroti pentingnya membangun solidaritas antara gerakan feminis dan gerakan lingkungan. Dia menekankan bahwa perjuangan melawan kekerasan terhadap perempuan dan alam harus bersatu dan saling mendukung. Mengatasi patriarki dan kapitalisme yang merusak membutuhkan upaya kolektif untuk menciptakan perubahan struktural yang mendorong keadilan gender dan keberlanjutan ekologis. Vandana Shiva mendorong perubahan yang melibatkan penolakan terhadap paradigma ekonomi yang berpusat pada pertumbuhan tak terbatas dan konsumsi berlebihan. Dia memperjuangkan transformasi menuju pola pikir dan praktik yang lebih berkelanjutan, yang menghormati hubungan manusia dengan

alam dan mendorong keadilan gender. Dalam upaya mencapai keberlanjutan ekologis dan keadilan gender, Shiva menekankan perlunya partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan. Perempuan harus memiliki akses yang setara terhadap sumber daya alam, perwakilan yang adil dalam forum pengambilan keputusan, dan kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada lingkungan hidup mereka.

d. Solidaritas ekologis.

Konsep ini menunjukkan pentingnya hubungan timbal balik antara manusia dan alam serta pentingnya solidaritas antar manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa perjuangan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan lingkungan harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Vandana Shiva berpendapat bahwa kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap alam memiliki akar yang sama dalam sistem dominasi patriarki dan kapitalis yang berfokus pada pemerasan sumber daya alam dan eksploitasi manusia. Oleh karena itu, perlawanan terhadap dominasi ini memerlukan solidaritas dan kerja sama di antara gerakan feminis, gerakan lingkungan, gerakan petani, dan komunitas lokal.

Solidaritas ekologis melibatkan pengakuan bahwa isu-isu lingkungan dan isu-isu feminis saling terkait dan saling mempengaruhi. Perjuangan melawan eksploitasi alam dan perjuangan untuk keadilan gender harus dilihat sebagai bagian dari perjuangan yang lebih luas untuk menciptakan masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Solidaritas ekologis juga mencakup pengakuan terhadap pengetahuan tradisional dan praktik berkelanjutan yang dimiliki oleh komunitas lokal, terutama oleh perempuan. Shiva menekankan pentingnya menghargai dan menghormati pengetahuan lokal dalam upaya menjaga keberlanjutan ekosistem. Hal ini melibatkan mengakui peran perempuan sebagai pemegang pengetahuan dan pengelolaan sumber daya alam, serta

memperkuat partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan lingkungan.

Solidaritas ekologis juga berarti mengatasi pemisahan antara isu-isu ekologi, sosial, dan ekonomi. Shiva berpendapat bahwa sistem ekonomi yang berpusat pada pertumbuhan tak terbatas dan konsumsi berlebihan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, solidaritas ekologis melibatkan perjuangan untuk mengubah sistem ekonomi yang merusak menjadi sistem yang berkelanjutan, adil, dan berwawasan lingkungan. Dalam praktiknya, solidaritas ekologis dapat ditunjukkan melalui kolaborasi antara kelompok feminis, kelompok lingkungan, kelompok petani, dan komunitas lokal dalam kampanye, protes, dan aksi kolektif. Solidaritas ini juga dapat diwujudkan melalui pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara kelompok-kelompok ini, serta melalui dukungan dan advokasi bersama dalam upaya mencapai perubahan yang berkelanjutan dan adil.

Dengan membangun solidaritas ekologis, gerakan feminis dan gerakan lingkungan dapat saling memperkuat dalam perjuangan mereka. Mereka dapat saling mendukung dalam mengampanyekan keadilan gender, perlindungan lingkungan, dan penghentian eksploitasi alam. Dalam konteks ini, gerakan feminis dapat memperkaya gerakan lingkungan dengan perspektif gender yang mendalam, sementara gerakan lingkungan dapat membantu mengaitkan isu-isu ekologi dengan isu-isu feminis. Solidaritas ekologis juga melibatkan upaya bersama untuk menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, dan degradasi lingkungan secara umum. Dalam menghadapi krisis ini, kerja sama dan solidaritas antar kelompok dan komunitas menjadi kunci untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan. Kolaborasi dalam penelitian, advokasi, dan implementasi kebijakan lingkungan dapat memperkuat suara dan kekuatan kelompok-kelompok yang berjuang untuk keberlanjutan. Selain itu, solidaritas ekologis juga dapat mendorong perubahan budaya dan paradigma yang mendasari dominasi manusia

terhadap alam dan perempuan. Dengan bersama-sama mengkritisi dan menantang nilai-nilai patriarki dan kapitalis yang memandang alam dan perempuan sebagai sumber daya yang dapat dieksploitasi, gerakan feminis dan gerakan lingkungan dapat membentuk pemikiran dan praktek yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

e. Pengakuan hak alam

Alam memiliki hak yang sama seperti manusia, sehingga harus diakui dan dilindungi oleh hukum. Pemikiran ini bertentangan dengan pandangan konvensional yang memandang alam sebagai objek yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Menurut Vandana Shiva alam memiliki hak-hak inheren yang harus diakui dan dihormati. Hal ini berarti bahwa alam bukan sekadar objek yang dapat dieksploitasi oleh manusia, tetapi memiliki keberadaan dan nilai intrinsik yang layak dihormati. Konsep ini bertujuan untuk melawan pandangan yang dominan dalam paradigma ekonomi dan politik saat ini yang memperlakukan alam sebagai sumber daya yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan semata.

Pengakuan hak alam melibatkan pemahaman bahwa alam memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan menjaga integritasnya sendiri. Ini mencakup kesadaran bahwa semua entitas alam, baik itu tumbuhan, hewan, sungai, hutan, dan ekosistem secara kolektif memiliki nilai intrinsik dan hak untuk bertahan hidup. Dalam pandangan ini, manusia bukanlah pemilik mutlak alam, tetapi bagian dari jaringan kehidupan yang saling terhubung dengan makhluk hidup lainnya. Pengakuan hak alam juga berarti mengakui bahwa manusia memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi dan melestarikan keberagaman hayati serta keutuhan ekosistem. Ini mencakup pengakuan bahwa manusia sebagai bagian dari alam harus hidup dalam keseimbangan dengan alam, menghormati batas-batas ekologi, dan tidak menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada lingkungan.

Dalam praktiknya, konsep pengakuan hak alam mendorong adanya kebijakan dan tindakan yang melindungi alam dan menjaga keseimbangan ekologi. Ini dapat berarti menghentikan praktik-praktik eksploitasi alam

yang merusak, seperti penebangan hutan yang tidak bertanggung jawab atau penggunaan bahan kimia berbahaya yang merusak ekosistem. Konsep ini juga mengarah pada adanya perlindungan hukum bagi lingkungan dan penerapan mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait lingkungan.

f. Pengetahuan lokal.

Konsep ini menekankan pentingnya pengetahuan dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Perempuan sebagai pelaku pengelolaan sumber daya alam yang seringkali memiliki pengetahuan lokal dan kearifan yang mendalam harus diakui dan diberdayakan. Menurut Shiva, pengetahuan lokal memiliki nilai yang tak ternilai karena telah dikembangkan selama berabad-abad oleh masyarakat yang hidup dalam ketergantungan yang erat dengan alam. Pengetahuan lokal ini mencakup pemahaman tentang ekologi, tanaman obat, metode pertanian berkelanjutan, konservasi air, dan tata kelola sumber daya alam lainnya yang telah terbukti efektif dalam menjaga keberlanjutan alam. Pengetahuan lokal juga mencerminkan hubungan holistik antara manusia dan alam. Dalam budaya-budaya tradisional, perempuan sering kali memiliki peran khusus dalam melestarikan dan meneruskan pengetahuan ini. Mereka menjadi penjaga pengetahuan lokal dan penerus tradisi yang berhubungan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Namun, pengetahuan lokal sering kali diabaikan, diinjak-injak, atau dianggap tidak berharga dalam konteks modern yang didominasi oleh pengetahuan ilmiah dan sistem ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan. Shiva berpendapat bahwa penindasan terhadap pengetahuan lokal juga berarti penindasan terhadap perempuan dan alam, karena perempuan sering kali menjadi pemegang dan pelaku pengetahuan lokal. Dalam teori ekofeminisme Vandana Shiva, pengetahuan lokal dilihat sebagai sumber kebijaksanaan yang kaya dan berharga dalam upaya menjaga keberlanjutan alam. Pengakuan dan penguatan pengetahuan lokal dianggap penting untuk membangun sistem yang adil, berkelanjutan, dan berdaya

tahan. Masyarakat harus menghormati dan melindungi pengetahuan lokal, serta berkolaborasi dengan masyarakat adat dan komunitas lokal dalam mengembangkan solusi untuk tantangan lingkungan dan sosial yang dihadapi saat ini

BAB III

WALHI JAWA TENGAH

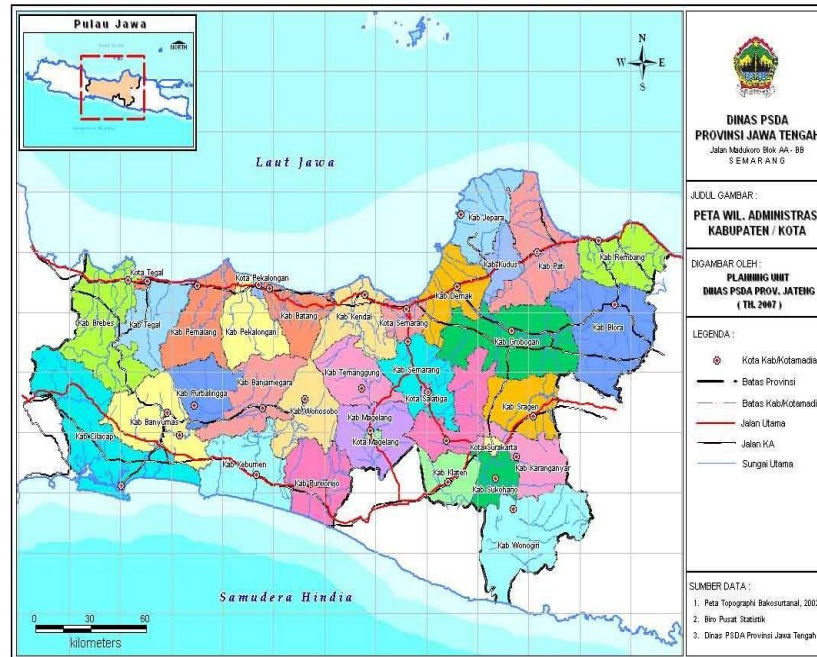
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah

1. Kondisi Geografis

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di tengah Pulau Jawa. Secara geografis letak wilayah provinsi Jawa Tengah berada pada 5° 40' – 8° 30' Lintang Selatan dan 108° 30' - 111° 30' Bujur Timur. Iklim Jawa Tengah termasuk dalam kategori iklim tropis. Pada Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah dataran tinggi dan juga pegunungan yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah; dan juga pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan Provinsi Jawa Tengah cukup bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringannya 0-2% sebesar 38% lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31% lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19% dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan.

Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 3.254.412 Ha atau 25,04% dari luas pulau Jawa. Secara administratif letak wilayah Provinsi Jawa Tengah berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta sementara di sebelah selatannya; Provinsi Jawa Barat disebelah Barat; Provinsi Jawa Timur disebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang mana meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Kabupaten Cilacap merupakan Kabupaten terluas di Jawa Tengah dengan luas wilayah 213.851 hektar (6,57 persen dari luas Jawa Tengah), sedangkan kota terluas adalah Kota Semarang dengan luas 37.367 hektar (1,15 persen dari luas Jawa Tengah). Kota tersempit di Provinsi Jawa Tengah adalah Kota Magelang dengan luas 1812 hektar (0,06 persen dari luas Jawa Tengah).

Gambar 2
Peta Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Bappeda, Provinsi Jawa Tengah

2. Kondisi Topografis

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah, dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh Jawa Tengah, dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahan di Jawa Tengah bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Topografi Provinsi Jawa Tengah terdiri dari wilayah daratan sebagai berikut:

- Ketinggian antara 0-100 m dari permukaan laut yang memanjang di sepanjang pantai utara dan selatan seluas 53,3%,

- Ketinggian antara 100-500 m dari permukaan laut yang memanjang pada bagian tengah pulau seluas 27,4% Ketinggian 500-1000 m dari permukaan laut seluas 14,7%,
- Ketinggian di atas 1000 m dari permukaan laut seluas 4,6%.

3. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Jawa Tengah pada Tahun 2015 sebesar 33.774. 141 jiwa, terdiri dari laki-laki 16.750.898 jiwa dan perempuan sebanyak 17.023.243 jiwa. Jumlah tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai Provinsi ketiga di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak setelah Jawa Barat dan Jawa Timur. Sementara penduduk Jawa Tengah belum menyebar secara merata di seluruh wilayah di Jawa Tengah. Biasanya penduduk terkonsentrasi hanya di perkotaan dengan adanya dukungan dari aspek kegiatan ekonomi yang disertai oleh sarana dan prasarana yang memadai. Kawasan pemukiman yang sangat padat terletak di daerah Semarang Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, dan juga Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.

B. Profil Walhi Jawa Tengah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah lembaga dengan fokus kegiatan berbasis kerakyatan, mengintegrasikan upaya advokasi, perlindungan, serta pendampingan segala sesuatu yang berkenaan dengan gerakan lingkungan hidup untuk meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan kekuasaan pemerintah daerah atau negara, dan lingkungan hidup. WALHI merupakan LSM atau lembaga yang memberdayakan masyarakat. `jika diibaratkan sebuah negara maka WALHI telah mencoba untuk menjadi miniatur sebuah negara, setidaknya jika dilihat dari konstitusi yang dimilikinya. Terdapat dua kekuasaan di WALHI yaitu kekuasaan eksekutif dan legislatif. Baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif sudah cukup jelas diatur di dalam Statuta maupun dalam Peraturan Pelaksanaan Statuta (PPS). Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Eksekutif Nasional, Eksekutif Daerah dan Anggota-anggota, sedangkan kekuasaan legislatif yang lebih ditekankan pada fungsi pengawasan dijalankan oleh Dewan Nasional dan Dewan Daerah. Selain dua kekuasaan tersebut masih terdapat satu lagi kekuasaan di dalam tubuh WALHI yaitu kekuasaan yudikatif yang berfungsi mengadili

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan implementasi konstitusi WALHI. Saat ini, institusi yudikatif ini dinamai dengan Majelis Etik Nasional dan Majelis Etik Daerah.

WALHI merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 487 organisasi dari unsur organisasi non pemerintah dan organisasi pencinta alam, serta 203 anggota individu yang tersebar di 28 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga saat ini, WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya penyelamatan dan pemulihan lingkungan hidup di Indonesia. WALHI bekerja untuk terus mendorong terwujudnya pengakuan hak atas lingkungan hidup, dilindungi serta dipenuhinya hak asasi manusia sebagai bentuk tanggung jawab Negara atas pemunahan sumber-sumber kehidupan rakyat.

WALHI menyadari bahwa perjuangan tersebut dari hari kehari semakin dihadapkan dengan tantangan yang berat, terutama yang bersumber pada semakin kukuhnya dominasi dan penetrasi rezim kapitalisme global melalui agenda-agenda pasar bebas dan hegemoni paham liberalisme baru (neo-liberalism), dan semakin menguatnya dukungan dan pemihakan kekuatan politik dominan di dalam negeri terhadap kepentingan negara-negara industri atau rejim ekonomi global. Rezim kapitalisme global menempatkan rakyat, lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat, bahkan bumi sebagai tumbal akumulasi kapital. Eksploitasi dan pengerukan sumber daya alam yang tiada habisnya yang berujung pada krisis lingkungan hidup, telah mempengaruhi tatanan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya dan pada akhirnya meningkatkan ancaman kerentanan keselamatan dan kehidupan seluruh warga negara, baik di perdesaan maupun perkotaan. Di tengah tantangan perjuangan penyelamatan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat yang begitu berat, dibutuhkan gerakan sosial yang kuat dan luas untuk secara bersama-sama memperjuangkan keadilan ekonomi, sosial dan ekologis untuk generasi hari ini dan generasi mendatang. WALHI memastikan dirinya menjadi bagian utama dari gerakan ini.

1. Sejarah berdirinya WALHI Jawa Tengah

WALHI Jawa Tengah berdiri antara tahun 1989 yang diinisiasi oleh lembaga-lembaga peduli lingkungan di Jawa Tengah. Pendirian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus-kasus pencemaran atau kerusakan lingkungan yang merugikan

masyarakat. Salah satu kasus lingkungan yang mencuat sejak tahun 1970 – 1980 adalah pencemaran lingkungan Kali Tapak. Pencemaran Kali Tapak di Semarang tersebut menjadi salah satu pemicu pendirian wahana lingkungan hidup Jawa Tengah. Kepengurusan Walhi Jateng terbentuk dengan terpilihnya Mas Hari Mulyadi dari LPTP Solo (Lembaga Pengembangan Teknologi Pedesaan) sebagai ketua Presidium Walhi Jawa Tengah. Presidium Walhi dibantu oleh kelompok kerja daerah (KKD) berdasarkan kewilayahan.

Pada periode tersebut, pengurus Kelompok Kerja Daerah (KKD) dipegang oleh empat (4) orang berdasarkan kewilayahan. KKD wilayah Surakarta dipegang oleh Baiquni (Prof. DR. Baiquni, MSc), Basuki Winoto (Bobo) dan Gunawan Wibisono. Untuk wilayah Semarang KKD dipegang oleh saudara M. Edi Waluyo (Muin). Pada era Mas Hari Mulyadi ini advokasi kasus lingkungan telah dilakukan yaitu antara lain kasus pencemaran lingkungan oleh PT Indo Acidatama di Kabupaten Karanganyar, Kali Banger Pekalongan dan lain sebagainya.

2. Visi misi dan Logo WALHI Jawa Tengah

a. Visi

Terwujudnya suatu tatanan sosial, ekonomi dan politik yang adil dan demokratis yang dapat menjamin hak-hak rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

b. Misi

- 1) Mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat
- 2) Mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat
- 3) Mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan
- 4) Membangun alternatif tata ekonomi dunia baru
- 5) Mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber-sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan

c. Logo

Gambar 3.

Logo Organisasi WALHI Jawa Tengah

Sumber: Dok. WALHI Jateng



3. Strategi dan Aksi Walhi Jateng

- a. Membangun tata kelola organisasi yang demokratis, bersih, dan efektif.
- b. Memaksimalkan peran Dewan Daerah sesuai fungsinya dalam menjalankan roda organisasi.
- c. Memaksimalkan peran anggota dalam setiap kampanye-kampanye.
- d. Membangun jaringan dan solidaritas publik yang kuat dalam kampanye-kampanye sesuai prinsip-prinsip organisasi.

4. Nilai-Nilai Dasar dan Prinsip Organisasi

a. Nilai-nilai dasar Organisasi

- 1) Menghormati Hak Asasi Manusia; Kesadaran, sikap dan tindakan yang mengutamakan dan menilai tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia.
- 2) Demokratis; dimana pelibatan konstituen (rakyat) yang aktif dalam sebuah proses pengambilan keputusan kolektif dan memberikan kesamaan hak-hak, kesetaraan politik dan partisipasi rakyat dalam menjalankan kendali hasil keputusan tersebut.
- 3) Keadilan gender; Semua orang berhak memperoleh kehidupan dan lingkungan hidup yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, agama dan status sosial. Berkelakuan adil terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal peran dan tanggung jawab yang terjadi karena keadaan sosial, budaya masyarakat maupun kebijakan politik negara.

- 4) Keadilan ekologis; menekankan pentingnya akses masyarakat pada benefit atas pemanfaatan sumber daya dan keadilan pengakuan yang menekankan pada pentingnya pengakuan terhadap eksistensi keragaman cara masyarakat mengelola alam.
- 5) Keadilan antar generasi; Semua generasi baik sekarang maupun mendatang berhak atas lingkungan yang berkualitas dan sehat
- 6) Persaudaraan sosial; Membangun kebersamaan dan solidaritas yang tinggi, dan mengikat diri dalam kerja-kerja sosial antar warga. Semua orang memiliki hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sama.
- 7) Anti kekerasan; Kesadaran, sikap dan tindakan yang menolak serta melawan praktek olah/unjuk kekerasan yang dilakukan oleh individu, kelompok, modal dan negara.
- 8) Keberagaman; Mengakui kesederajatan manusia dalam keragaman atau kemajemukan yang merupakan kenyataan sekaligus keniscayaan dalam kehidupan di masyarakat.

b. Prinsip-prinsip Organisasi

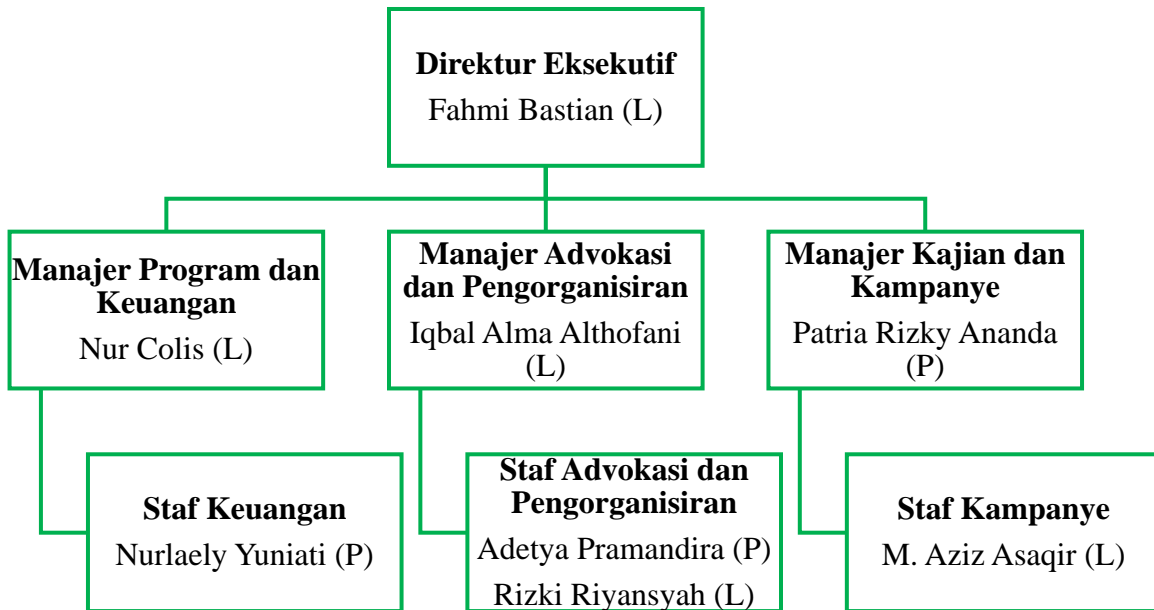
- 1) Keterbukaan; Menyampaikan informasi yang sebenarnya berkaitan dengan pengelolaan organisasi, program, dan hasil audit keuangan kepada pihak-pihak yang terkait, baik diminta maupun tidak diminta.
- 2) Keswadayaan; Semua pihak diharapkan mendukung keswadayaan politik dan ekonomi masyarakat.
- 3) Profesional; Memelihara kepercayaan masyarakat dalam upaya perlindungan dan penyelamatan lingkungan hidup, segala bentuk aktifitas organisasi harus sesuai dengan kepentingan rakyat (korban dan keluarganya), dan segala bentuk aktifitas organisasi dapat dimintakan tanggung gugatnya. Semua pihak hendaknya bekerja secara profesional, sepenuh hati, efektif, sistematis dan tetap mengembangkan semangat kolektivitas.
- 4) Ketauladanan; Memimpin rakyat melalui tindakan ataupun perbuatan yang dapat memberikan inspirasi dan contoh kepada orang lain, kepada rakyat.

- 5) Kesukarelawanan; Diwujudkan dengan tidak menjadikan imbalan/pamrih dan/atau kedudukan/kekuasaan sebagai tujuan, kecuali semata-mata dimaksudkan untuk pemberdayaan dan kemandirian rakyat dan jejaring

5. Struktur Organisasi dan Lembaga anggota WALHI Jawa Tengah

Bagan. 1

Struktur Organisasi Walhi Jateng 2023



Lembaga Anggota Walhi Jawa Tengah

- 1) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang
- 2) Mitapasa (KPA – IAIN Salatiga)
- 3) Selendang Perempuan – Kabupaten Semarang
- 4) Jaringan Kerja Pendamping Masyarakat (JKPM) – Wonosobo
- 5) Lembaga Kajian untuk Transformasi Sosial (LKTS) – Boyolali
- 6) Suphel – Karanganyar
- 7) Lembaga Masyarakat Indonesia Hijau (LMIH) – Karanganyar
- 8) Pelita Bangsa – Salatiga
- 9) Yayasan Abdi Umat – Kabupaten Semarang

6. Program Kerja WALHI Jawa Tengah

Kerja-kerja advokasi dan kampanye yang dilakukan oleh WALHI Jateng meliputi kerja jaringan, kampanye, pendidikan rakyat, pendampingan, membentuk organisasi rakyat hingga kerja-kerja pengorganisasian untuk mendesak perubahan suatu kebijakan. Untuk mendukung kerja-kerja advokasi tersebut Walhi Jateng mempunyai program kerja yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu Penguatan kesadaran kritis masyarakat sipil Jawa Tengah, Konsolidasi gerakan masyarakat sipil Jawa Tengah, dan Mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada hak masyarakat sipil atas lingkungan hidup yang berkeadilan.

a. Penguatan Kesadaran Kritis Masyarakat Sipil Jawa Tengah tentang politik dan keadilan lingkungan.

1) Sekolah Iklim

Sekolah iklim merupakan forum untuk memberikan edukasi dan berbagi informasi serta pengalaman tentang fenomena krisis iklim khususnya di wilayah Jawa Tengah. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah menjadikan anak muda menjadi pilihan utama yang nantinya diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal fenomena krisis iklim ini untuk dapat dikurangi dan atau meminimalisir faktor penyebab parahnya krisis iklim ini.

2) Pendidikan Kritis Lingkungan

Pendidikan kritis lingkungan merupakan forum untuk memberi edukasi dan berbagi informasi serta pengalaman tentang kasus-kasus kerusakan lingkungan khususnya di Jawa Tengah. Pendidikan krisis lingkungan telah dilaksanakan di banyak lokasi oleh WALHI Jateng. Selain berasal dari undangan untuk menjadi narasumber/pemantik, kegiatan pendidikan kritis lingkungan juga diadakan sendiri oleh WALHI Jateng baik secara online maupun offline.

3) Produksi Konten

Produksi konten merupakan bagian kampanye mengenai kasus-kasus lingkungan hidup, kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan sebagainya yang dilakukan melalui berbagai macam platform dan media. Selain produksi konten kampanye kasus yang didampingi WALHI Jateng dan kondisi lingkungan di

Jawa Tengah, WALHI Jateng juga turut bersolidaritas untuk membantu kampanye kasus-kasus lain, baik melalui repost maupun produksi ulang konten.

4) Pers Rilis/Media Online/Berita

Pers Rilis WALHI Jateng dibuat secara rutin setiap bulan yang berisi respon mengenai isu tertentu dan berbagai kegiatan yang dilakukan WALHI Jateng. Rilis tersebut disebarluaskan melalui group Whatsapp, instagram hingga jaringan pers yang dimiliki oleh WALHI Jateng.

5) Bincang Lingkungan

Bincang lingkungan meliputi berbagai macam diskusi seputar isu lingkungan yang diadakan WALHI Jateng dan diskusi yang bekerjasama dengan berbagai lembaga, baik NGO hingga berbagai macam organisasi mahasiswa.

b. Konsolidasi gerakan masyarakat sipil Jawa Tengah

1) Walhi Go To Campus

WALHI Go To Campus bertujuan untuk mengajak para mahasiswa untuk dapat ikut dan bergabung dalam kerja-kerja WALHI Jateng. Kegiatan ini berupa pelatihan, diskusi, konsolidasi dan aksi-aksi yang dilakukan di kampus-kampus.

2) Kopi Darat NGO dengan Jaringan Wartawan

Kopi darat NGO dengan jaringan wartawan bertujuan untuk mengumpulkan jaringan wartawan di Jawa Tengah sehingga dapat menunjang kerja-kerja yang dilakukan WALHI Jateng. Kegiatan ini sudah dilakukan oleh WALHI Jateng melalui berbagai macam kegiatan seperti diskusi, Halal Bi Halal, berbagai konferensi pers hingga kunjungan.

3) Community Exchange

Community Exchange bertujuan untuk penguatan organisasi rakyat melalui sharing pengetahuan dan pengalaman antar organisasi rakyat. Kegiatan ini telah dilakukan WALHI Jateng sepanjang tahun 2022 melalui berbagai kegiatan, seperti jagongan Geothermal (Warga: Dieng, Gn Slamet, Gn Ciremai,

Padarincang, Arjuno-Welirang), Jagongan Pantura (Organisasi rakyat disepanjang Pantura) dan Youth Camp 2022.

4) Posko Saling Jaga

Posko Saling Jaga merupakan koalisi tanggap bencana yang beranggotakan WALHI Jateng, PELITA, Gusdurian Semarang, Humanity First, GEMA FKUB Jawa Tengah, FKUB Jawa Tengah, PMKRI dan sebagainya. Sepanjang tahun 2022, Posko Saling Jaga aktif merespon berbagai macam bencana yang terjadi di Indonesia, salah satunya gempa Cianjur (November) melalui berbagai macam kegiatan, seperti penggalangan dana, pakaian layak pakai hingga penyaluran bantuan. Namun demikian, posko saling jaga masih memiliki tantangan mengenai keberlanjutan koalisi, karena baru sebatas melakukan penggalangan dan penyaluran bantuan. Belum pernah dilakukan peningkatan kapasitas mengenai kebencanaan untuk anggota koalisi.

5) Kongkow Sahabat WALHI Jateng

Kongkow Sahabat WALHI bertujuan untuk mengajak para anak muda untuk dapat ikut dan bergabung dalam kerja-kerja WALHI Jateng. Sepanjang tahun 2022, WALHI Jateng telah menjalankan program tersebut. Walaupun belum memiliki komunitas Sahabat WALHI, tetapi tujuan dari program tersebut telah tercapai melalui berbagai macam kegiatan yang diadakan oleh WALHI Jateng, seperti diskusi, konsolidasi, temu alumni (Sekolah Iklim, sekolah energi dan program magang) hingga berbagai kegiatan peringatan hari mengenai lingkungan. Selain itu, WALHI Jateng membangun kerja-kerja riset kolaborasi hingga melibatkan jaringan anak muda dalam proses advokasi dan kampanye yang dilakukan oleh WALHI Jateng.

c. Mendorong Lahirnya Kebijakan Yang Berpihak Pada Hak Masyarakat Sipil atas Lingkungan Hidup yang Berkeadilan

1) Analisis Kebijakan

Sepanjang tahun 2022, WALHI Jawa Tengah telah membuat beberapa kajian mengenai infrastruktur di Semarang, baik oleh WALHI Jateng maupun kerja-kerja kolaborasi dengan individu/kelompok, seperti kajian kondisi 3 DAS

di Semarang, Maladaptasi Krisis Iklim (Tol-Tanggul Laut Semarang Demak), Kajian Kondisi Mangrove (Kendal-Semarang-Demak) dan Investigasi Banjir Desember 2022-Januari 2023).

2) Laporan Situasi lingkungan hidup di Jawa Tengah

Laporan situasi lingkungan Jawa Tengah telah disampaikan oleh WALHI Jateng kepada pemerintah melalui berbagai macam kegiatan, seperti wawancara, diskusi hingga konsultasi publik RTRW Provinsi Jawa Tengah.

3) Kampanye responsif kebijakan

Kampanye responsif kebijakan bertujuan untuk memberikan statement WALHI Jateng mengenai kebencanaan dan dampak kebijakan yang dilakukan. Hal tersebut telah dilakukan WALHI Jateng sepanjang tahun 2022 melalui pers rilis yang disebar ke berbagai platform media dan pers, wawancara berita, konferensi pers hingga diskusi.

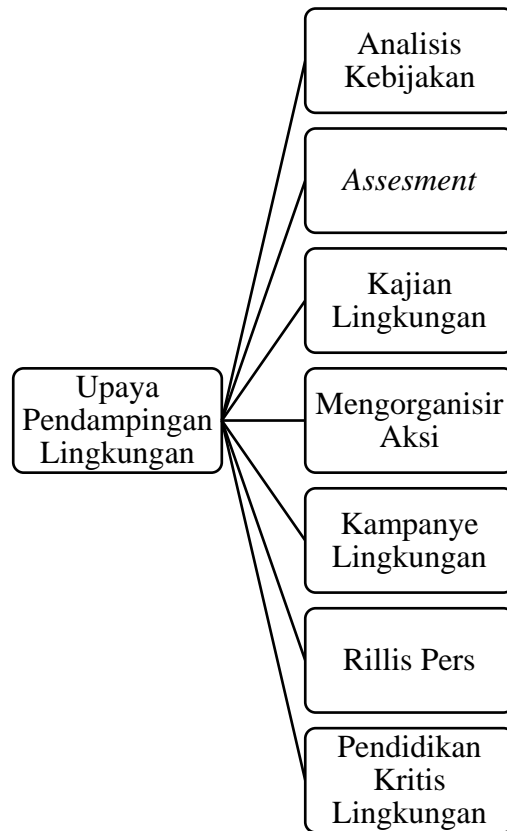
BAB IV
UPAYA PENDAMPINGAN YANG DILAKUKAN OLEH AKTIVIS
PEREMPUAN WALHI DAN ALASANNYA

A. Upaya Pendampingan Lingkungan

Upaya pendampingan yang dilakukan perempuan Walhi Jateng yaitu meliputi analisis kebijakan, *assesment*, kajian lingkungan, mengorganisir aksi, kampanye lingkungan, rillis pers dan pendidikan kritis lingkungan.

Bagan. 2

Upaya Pendampingan Lingkungan Perempuan Walhi Jateng



1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan (Dunn. 2000). Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan, analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, dan kinerja kebijakan dan program publik. Analisis kebijakan dalam upaya pendampingan lingkungan dilakukan dengan tujuan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak pada hak masyarakat sipil atas lingkungan hidup yang berkeadilan.

“analisis kebijakan merupakan upaya kami untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap lingkungan, kami dapat mengidentifikasi kebijakan-kebijakan yang dapat melahirkan tindakan-tindakan yang dapat berpotensi merusak lingkungan dan merampas hak masyarakat”

Berdasarkan penjelasan Dera dapat diketahui bahwa analisis kebijakan adalah upaya untuk mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap lingkungan. Analisis kebijakan dilakukan Perempuan Walhi Jateng dalam beberapa sektor meliputi pembangunan infratraktur dan tata ruang, energy, hutan dan pesisr. Salah satu analisis kebijakan yang dilakukan perempuan Walhi yaitu kebijakan energi. Kebijakan energi Provinsi Jawa Tengah telah di atur dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2018. Tujuan dari RUED ini diantaranya: merumuskan kebijakan energi daerah yang selaras dengan kebijakan energi nasional dan kebutuhan daerah, mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi daerah, meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan di Jawa Tengah. Namun, walaupun sudah memiliki RUED, pengelolaan energi di Jawa Tengah masih memiliki banyak problematika dari hulu (eksploitasi sumber) hingga hilir (distribusi energi).

Beberapa problematika pengelolaan energi di Jawa Tengah disebutkan dalam laporan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup Walhi Jateng (2022) yaitu Pada tahun 2022, PT PLN (Persero) mengalami kelebihan listrik sebanyak 6 *Giga Watt* (GW). PT PLN (Persero) memperkirakan bahwa beberapa tahun kedepan, pembangkit listrik di Jawa-Bali akan *oversupply* mencapai 61% dari total kebutuhan. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan cadangan listrik akibat banyaknya pembangkit listrik skala besar yang akan dibangun dan beroperasi. Kondisi ini diperparah dengan adanya sistem kontrak jual beli listrik dengan produsen listrik swasta (*Independent Power Producer/IPP*), yaitu menggunakan skema *take or pay*, artinya dipakai atau tidak listrik yang diproduksi, PLN tetap harus membayar sesuai kontrak. Selain membebani PLN, kelebihan listrik tersebut juga membebani rakyat, karena salah satu solusinya adalah menghilangkan daya 450 V dan menaikkan harga listrik di masyarakat.

Di tengah surplus listrik yang bersumber dari berbagai pusat energi kotor, yang telah memicu sejumlah krisis sosial dan ekologis di berbagai wilayah, Jawa Tengah

kini mulai mengencarkan pembangunan pusat-pusat energi yang diklaim sebagai energi baru terbarukan (EBT) sebagai ambisi dalam melakukan transisi energi. Salah satu jenis EBT yang dianggap dapat menggantikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai pembangkit beban puncak (base-load) adalah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Berdasarkan rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) Jawa Tengah tahun 2021-2030 terdapat 6 Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), yaitu Dataran Tinggi Dieng (280 MW), Guci (92 MW), Baturaden (220 MW), Umbul Telomoyo (72 MW), Ungaran (110 MW) dan Gunung Lawu (195 MW). Jumlah tersebut belum dengan cadangan panas bumi yang ada di Jawa Tengah. Selain itu ada juga Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Jawa Tengah yang sekaligus menjadi solusi dalam penyelesaian masalah sampah. Di Jawa Tengah, terdapat dua rencana proyek pembangunan PLTSA, yaitu PLTSA Putri Cempo yang berada di Kota Surakarta dan PLTSA Jatibarang yang berada di Kota Semarang.

Proyek pembangunan yang diklaim sebagai energi baru terbarukan ini juga sama-sama memiliki pola eksploitasi dan problematika yang sama dengan subjek yang berbeda, serta kerap merusak kualitas lingkungan dan merampas ruang hidup rakyat, bukan untuk memulihkan krisis sosial-ekologis yang telah memburuk. Transisi energi pada akhirnya akan berakhir sama, menciptakan krisis sosial-ekologis pada masyarakat. Beberapa kasus energi di Jawa Tengah yang didampaingi perempuan Walhi Jateng yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng di Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo, Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSA) di Kota Surakarta dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Cilacap.

Peran analisis kebijakan lebih bersifat tidak langsung dalam melakukan reformasi sosial. Perempuan walhi melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat, mengevaluasi bagaimana respon pemerintah terhadap masalah mengajukan opsi-opsi kebijakan dan memantau penerapan kebijakan. Analisis kebijakan dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu pendekatan prospektif, restrospektif dan integrative (Suharto, 2009: 169)

- a) Pendekatan prospektif: yaitu analisis dilakukan terhadap kondisi sosial masyarakat sebelum kebijakan diterapkan. Mengajukan opsi kebijakan baru terhadap

pemerintah untuk merespon kondisi atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat, karena belum ada kebijakan untuk itu.

- b) Pendekatan retrospektif: yaitu analisis dilakukan terhadap kebijakan yang sudah ada, artinya menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan akibat diterapkannya sebuah kebijakan.
- c) Pendekatan integrative: yaitu perpaduan dari kedua pendekatan di atas. Analisis dilakukan baik sebelum maupun sesudah kebijakan diterapkan.

Pada kasus diatas Perempuan Walhi menggunakan pendekatan retrospektif. Pendekatan retrospektif yaitu menganalisis kebijakan yang sudah ada dan menganalisis dampak-dampak yang ditimbulkan adanya sebuah kebijakan. Pendekatan tentang dampak dari sebuah kebijakan jarang yang mempertimbangkan aspek-aspek perempuan. Aspek-aspek perempuan sangat penting digunakan dalam mempertimbangkan dampak dari sebuah kebijakan karena perempuan menjadi objek yang paling merasakan dampak dari adanya sebuah kebijakan (Vandana Shiva. 2005). Dalam teori ekofeminisme Vandana Shiva berpendapat bahwa perempuan dapat merumuskan sebuah kebijakan penolakan terhadap “mengejar pembangunan”. Mereka memahami bahwa strategi mengejar pembangunan ini bukanlah solusi yang tepat bagi perempuan dan bagi masyarakat (Vandana Shiva. 2005)

2. *Assessment*

Assessment merupakan suatu proses untuk mendapatkan informasi yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan (Basuki dan Hariyanto. 2014 5-9). *Assesment* biasanya di gunakan dalam dunia pendidikan. Menurut Kunandar (2015: 66) *assessment* adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis, akurat, dan berkesinambungan. *Assessment* ini dilakukan menggunakan alat ukur tertentu, sehingga menjadi informasi dalam pengambilan keputusan pencapaian kompetensi. Dalam advokasi lingkungan *assessment* dilakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang valid tentang kasus kerusakan lingkungan.

“*assessment* merupakan proses yang kami lakukan untuk mendapatkan informasi dan data yang valid tentang kasus kerusakan lingkungan dan fakta dilapangan

menggunakan alat assessmen yang sudah disiapkan” (wawancara dengan Patria Rizki Ananda)

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa *assessment* adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh dan menganalisis data yang valid tentang kasus kerusakan lingkungan yang dilakukan secara sistematis menggunakan alat *assessment* khusus. Dengan adanya data hasil *assesmen* perempuan Walhi Jateng menyusun rencana advokasi lingkungan lebih lanjut.

Perempuan Walhi Jateng melakukan *Assesment* pada beberapa kasus energi di Jawa Tengah salah satunya yaitu Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Dieng. Berdasarkan keterangan yang disampaikan Patria Rizki Ananda yang merupakan manager kajian dan kampanye Walhi Jateng, saat ini PLTP Dieng 1 telah memiliki 12 titik pengeboran dan pengaktifan kembali 1 titik pengeboran. Lokasi titik pengeboran ini tersebar diberbagai Desa, yaitu Desa Karangtengah, Sikunang, Pakisan, dan Dieng Kulon. Sebagian besar lokasi titik pengeboran tersebut berada didekat pemukiman warga dan pertanian warga. Jika menggunakan radius dampak 500 meter, maka semua pemukiman warga di 4 desa tersebut berada dalam wilayah tidak aman/berbahaya. Berbagai macam dampak dari keberadaan industri *geothermal* ini berupa perubahan pada sumber mata air, suhu udara, suhu tanah, hujan asam, suara bising/gemuruh dan sebagainya. Permasalahan tersebut sudah pernah warga sampaikan kepada pihak *Geo Dipa*, namun hanya direspon dengan mengontrol kondisi air tanpa menyampaikan kepada warga. Pada akhirnya warga karantengah mengalami krisis air dan akan memuncak pada musim kemarau.

Krisis air bersih menjadi ancaman terbesar bagi keberlangsungan hidup warga Karangtengah. Bahkan untuk mencari alternatif sumber air, salah satu warga Desa Karangtengah pernah mencoba untuk menggali sumur air tanah sedalam 30 meter, namun tidak mengeluarkan air. Berkurangnya persediaan sumber air di sebabkan karena sumber air dialihkan bagi kepentingan industri dan pembangunan yang merupakan sebuah ancaman telak bagi kesehatan dan kelangsungan hidup anak-anak (Shiva. 2005). Permasalahan pertanian warga selain krisis air adalah lahan yang sudah mulai tidak produktif akibat keberadaan PLTP. Mereka menduga kondisi ini diakibatkan oleh adanya hujan asam, sehingga membuat lahan-lahan tidak productif

dan harus membutuhkan lebih banyak lagi air untuk pertanian. Hujan asam yang terjadi juga berdampak pada rumah dan kendaraan warga, terutama yang berbahan besi. Dampak ini berupa segala hal yang memiliki kandungan besi maka akan cepat berkarat.

Keberadaan PLTP Dieng Unit 1 dan rencana *powerplan* PLTP Dieng unit 2 telah menciptakan konflik *horizontal* di masyarakat Desa Karangtengah, antara warga yang setuju dengan PLTP Dieng dan warga yang menolak, sehingga membuat kehidupan warga Desa Karangtengah menjadi tidak harmonis. Selain itu beberapa warga yang menolak mengalami berbagai macam intimidasi dari sesama warga dan pihak aparat kepolisian. Hingga kini, warga yang menolak pembangunan *powerplan* PLTP Dieng 2 terus memperluas dan meningkatkan eskalasi penolakan. Berbagai pertemuan warga sering dilakukan untuk saling menguatkan, berbagi informasi dan meningkatkan kapasitas warga. Salah satunya yaitu pendidikan mengenai hukum kritis, proyek *geothermal*, membangun Gerakan warga hingga mitigasi kriminalisasi warga. Selain itu, perlawanan yang dilakukan oleh warga juga berdasarkan kearifan lokal mereka, salah satunya adalah dengan melakukan *istighosah* atau *mujahadah*. Melalui data *assessment* tersebut, perempuan Walhi dapat memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang kasus yang akan dihadapi dan dapat merumuskan strategi advokasi yang lebih lanjut.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Vandana Shiva pada saat melakukan pengamatan terhadap fenomena sosial tidak mengawali dari posisi sebagai pengamat yang bersifat netral, melainkan mengambil posisi sebagai pengamat yang penuh simpati dan berempati terhadap pihak yang dirugikan akibat dari kebijakan politik maupun pengembangan ilmu pengetahuan. Ketidakadilan lebih banyak dirasakan oleh pihak yang menjadi korban dibandingkan dari pelaku yang berbuat tidak adil. Shiva berusaha menyelami secara komprehensif perasaan pihak yang menjadi korban dengan cara menganalisis, menginvestigasi dan menginventarisasi berbagai kerugian secara kuantitatif maupun kualitatif akibat dari kebijakan pengembangan politik maupun ilmu pengetahuan yang salah arah. Keadilan dapat terwujud apabila suara kurban yang menderita, tersingkirkan, dan menjadi kurban kebijakan atau sistem yang ada lebih banyak didengar, diperhatikan, dan dicarikan solusi.

3. Kajian Lingkungan

Menurut Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Mengkaji dalam KBBI berarti belajar, mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, menelaah. Kajian lingkungan merupakan proses sistematis untuk mengevaluasi implikasi lingkungan dari kebijakan, rencana, atau program yang diusulkan dan menyediakan sarana untuk melihat efek kumulatif dan menanganinya dengan tepat pada tahap awal pengambilan keputusan (Sadler dan Verhemm. 2011). Mengutip Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 tahun 2016, Kajian lingkungan hidup adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana dan atau program.

Kajian lingkungan dilakukan perempuan Walhi setelah mendapatkan data awal tentang permasalahan lingkungan.

“kajian lingkungan merupakan proses yang kami lakukan dalam mengkaji kasus kerusakan lingkungan untuk mengetahui dampak pembangunan terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, selain itu juga untuk memberikan rekomendasi dan arahan untuk mengatasi dampak dari kerusakan lingkungan”

Menurut Derra yang merupakan staff advokasi dan pengorganisasian Walhi Jateng kajian lingkungan merupakan serangkaian proses dalam mengkaji kerusakan lingkungan untuk mengetahui dampak pembangunan terhadap masyarakat dan lingkungan. Kajian ini dilakukan dengan melibatkan akademisi dan ahli yang berkompeten. Kajian lingkungan dilakukan pada kasus PLTP Dieng yang dilakukan bersama 4 orang mahasiswa teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Agung Semarang (UNISULA). Menurut Derra kajian lingkungan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Dieng terhadap lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat Kawasan Dieng. Ruang lingkup materi pada kajian ini adalah potensi panas bumi, kondisi geografis,

sosial dan ekonomi wilayah yang mencakup daerah sekitar Dieng khususnya wilayah yang terdampak oleh adanya Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 1 Dieng.

Dalam kajian ini disebutkan bahwa kerusakan lingkungan yang telah dirasakan oleh masyarakat Dieng yaitu berupa pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara dan pencemaran suara. Dampak dari pembangunan dan aktivitas yang telah dirasakan masyarakat harus segera ditangani sejak dini. Salah satu kajiannya disebutkan bahwa Pencemaran air adalah sebuah kondisi dimana zat berbahaya seperti bahan kimia atau *mikroorganisme* yang mengkontaminasi sungai, danau, laut atau badan air lainnya dan menjadikannya beracun bagi makhluk hidup. Penyebab pencemaran air yang utama diakibatkan oleh campur tangan manusia yang tidak bertanggungjawab. Faktor terjadinya pencemaran dapat dikarenakan adanya aktivitas manusia atau makhluk hidup lain, zat, energi atau komponen lain ke dalam air sehingga menyebabkan kualitas air tercemar (Laporan Kajian PLTP Dieng (2021)).

Dampak buruk yang ditimbulkan dari pencemaran air yaitu dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Air yang terkontaminasi bisa mengakibatkan berbagai penyakit berbahaya. Tidak hanya itu, pencemaran air juga dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi seluruh aspek makhluk hidup yang ada di dalamnya. Polutan kimiawi yang terbuang ke dalam air memiliki kandungan yang berbahaya bagi makhluk hidup (Laporan Kajian PLTP Dieng 2021). Terdapat beberapa mata air utama yang dimanfaatkan masyarakat dieng untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat yang tercemar diantaranya mata air dari telaga, gunung, dan juga air sumur.

“Pencemaran air berupa perubahan aroma air menjadi berbau, beberapa sumber air menjadi lebih hangat dan juga memiliki rasa yang asin dirasakan oleh warga Pawuhan. Sementara pada desa Sikunang tepatnya di dukuh Ngandam warga merasakan adanya bau belerang pada air”

Dari penjelasan oleh Derra tersebut dapat diketahui bahwa mata air utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat Dieng untuk kebutuhan sehari-hari telah tercemar. Sebagai elemen yang sangat penting bagi makhluk hidup, air bersih harus selalu dijaga kualitasnya hingga memenuhi syarat kesehatan dan layak di konsumsi. Maka dari itu, air bersih merupakan aset yang sangat penting bagi makhluk hidup karena sangat

dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari sehingga pencemaran air harus segera di cegah sedini mungkin.

Kelangkaan air bersih berpengaruh terhadap kebutuhan strategis perempuan sebagai bagian dari bawaan kodrat yaitu menstruasi, menjaga kesehatan alat reproduksi, pada waktu hamil / mengandung, pada saat menyusui bayi maupun menjalankan tugas pekerjaan rumah tangga. Kebutuhan air yang bersih dan sehat perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Pada saat perempuan mengalami masa menstruasi seiring dengan keluarnya darah tubuh membutuhkan zat cair yang lebih banyak dibandingkan dengan hari hari biasa. Menstruasi merupakan bawaan kodrat perempuan yang selalu akan dialami setiap bulan mengikuti ritme perkembangan biologis. Hanya perempuanlah yang mengalami menstruasi sedangkan laki-laki tidak. Kekurangan air pada saat perempuan mengalami menstruasi akan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada perempuan. Perempuan membutuhkan air bersih dan sehat lebih banyak untuk menjaga, merawat dan memelihara kesehatan alat reproduksinya. Perempuan setelah buang air kecil alat kelaminnya perlu disiram dengan air supaya tetap terjaga kesehatannya. Laki-laki setelah buang air kecil tidak mutlak memerlukan air. Perempuan memerlukan air yang lebih banyak untuk menjaga tingkat kelembapan dan kebersihan alat reproduksinya. Air yang terkontaminasi bakteri dapat mengganggu kesehatan alat reproduksi perempuan seperti mengalami keputihan maupun gatal-gatal pada alat kelaminnya. Pada waktu hamil tingkat kebutuhan air perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Pada waktu hamil perempuan bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi juga menghidupi janin yang ada dalam kandungannya. Selain mengkonsumsi air untuk keperluan tubuhnya sendiri, dia juga berfungsi sebagai perantara janin untuk memenuhi kebutuhan primernya agar dapat bertahan hidup. Air yang diminum akan berdampak terhadap bagi kesehatan dirinya maupun janin yang berada di dalam kandungannya. Mutu kualitas generasi mendatang salah satunya dipengaruhi oleh zat-zat yang dikonsumsi janin sewaktu berada didalam kandungan

Untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya, pencemaran air dapat dicegah dengan beberapa cara, yaitu :

- 1) Melakukan pengolahan limbah yang benar

- 2) Menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan
- 3) Menanam pohon di setiap lahan yang tersedia
- 4) Menjauhkan sumber polutan dari sumber air

4. Mengorganisir aksi

Aksi merupakan suatu kegiatan yang terkoordinasikan untuk mencapai tujuan perubahan dalam rangka memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, mengoreksi ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Menurut Max Weber (1962) dalam bukunya yang berjudul “*Sosiologi: Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*”, aksi sosial adalah tindakan seorang individu yang dapat mempengaruhi individu-individu lainnya dalam masyarakat. Mengorganisir aksi dilakukan Perempuan Walhi Jateng untuk merespon dan menolak adanya pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Dalam kasus PLTP Dieng aksi demo dilakukan dengan menempel poster-poster penolakan PLTP. Penolakan tersebut merupakan respon dari adanya rencana penambangan powerplan unit 2 PLTP Dieng yang lokasinya hanya berjarak 2 meter dari permukiman warga.

Gambar. 4

Aksi warga menolak PLTP Dieng dengan menempel poster dan spanduk



Sumber: Dok Walhi Jateng

“aksi tersebut merupakan respon atas rusaknya sumber kehidupan mereka dari mulai air, udara, tanaman, tanah, hingga kenyamanan akibat operasional PLTP, Penolakan PLTP Dieng tidak hanya muncul dari masyarakat Karangtengah, tetapi juga dari desa-desa lain yang menjadi konsesi dan terdampak akibat aktivitas PLTP tersebut”

Mengorganisir aksi dalam upaya advokasi lingkungan meliputi proses merencanakan, mengkoordinasikan, dan melaksanakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan, sikap, atau tindakan yang berhubungan dengan isu kerusakan lingkungan. Mengorganisir aksi melibatkan mobilisasi masyarakat, kampanye kesadaran, demonstrasi protes, petisi, pertemuan public, dan berbagai bentuk tindakan kolektif lainnya untuk mencapai tujuan advokasi lingkungan. Mengkoordinir aksi dalam advokasi lingkungan penting karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengekspresikan keprihatinan mereka dan menyuarakan tuntutan mereka. Dengan menggalang dukungan massa aksi ini dapat memiliki dampak yang signifikan dalam mempengaruhi kebijakan publik dan menciptakan kesadaran yang luas tentang pentingnya perlindungan lingkungan.

Selain aksi untuk memperjuangkan keadilan dalam advokasi lingkungan di daerah, perempuan Walhi juga terlibat dalam mengkoordinir Aksi Kamisan Semarang, para aktivis perempuan mengajak warga Semarang untuk terus mengingat pelanggaran HAM yang telah terjadi di Indonesia, serta berpartisipasi untuk menuntut kasus-kasus pelanggaran HAM yang tak kunjung menemui penyelesaiannya. Selain itu, Aksi Kamisan Semarang juga bertujuan untuk memberikan informasi akan bahaya pelanggaran HAM dengan tujuan tidak akan ada lagi yang menjadi korban pelanggaran HAM dimasa mendatang, apalagi jika menjadi pelaku dalam pelanggaran HAM tersebut.

Berhadapan dengan fakta yang dihadapi di lapangan, Shiva mengambil dua langkah: pertama melakukan kritik terhadap berbagai fenomena sosial-ekonomi-kultural di masyarakat yang berpotensi memunculkan ketidakadilan gender maupun kerusakan lingkungan. Berbagai bentuk penindasan baik yang dilakukan secara halus maupun kasar berusaha dibongkar dan diungkap asumsi–asumsi yang mendasarinya. Langkah kedua, Shiva berusaha menarik konsepsi umum bertolak dari fakta yang

ditemui, dirasakan, diperoleh di lapangan untuk kemudian dirumuskan dengan visi baru yang dipandang lebih baik. Proses generalisasi ditempuh setelah melakukan analisis pengamatan secara memadai.

5. Kampanye Lingkungan

Kampanye lingkungan merupakan salah satu upaya untuk menyampaikan informasi atau gagasan tentang pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan. Kampanye lingkungan Perempuan Walhi Jateng dilakukan dengan berbagai cara baik langsung maupun melalui platform media sosial. Kampanye langsung dilakukan dengan aksi turun ke jalan pada saat car free day ataupun di tempat-tempat keramaian yang lain. Sedangkan kampanye melalui media sosial yaitu dengan produksi konten kampanye mengenai kasus-kasus lingkungan hidup, kerusakan lingkungan, perubahan iklim dan sebagainya melalui berbagai macam platform media sosial seperti *intagram*, *twiter*, dan *youtube*. Selain produksi konten kampanye kasus yang didampingi WALHI Jateng dan kondisi lingkungan di Jawa Tengah, Perempuan WALHI Jateng juga turut bersolidaritas untuk membantu kampanye kasus-kasus lain, baik melalui repost maupun produksi ulang konten.

“Kampanye lingkungan penting dilakukan dalam advokasi lingkungan karena selain dapat menyebarluaskan berita di media sosial, kampanye lingkungan juga untuk mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan”

Berdasarkan penjelasan dari Laely tersebut kampanye lingkungan tidak hanya bertujuan untuk menyebarluaskan informasi tetapi juga untuk mengedukasi masyarakat luas tentang cara mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Beberapa kampanye lingkungan yang dibuat oleh Perempuan walhi Jateng yaitu kampanye krisis iklim di kota Semarang, kampanye tolak pembangunan PLTP Dieng, kampanye tolak pembangunan pembangkit listrik tenaga sampak (PLTSa), dan kampanye lingkungan yg lain.

Gambar. 5

Kampanye krisis iklim di Kota Semarang



Sumber: Dok. Walhi Jateng

Kampanye lingkungan yang dilakukan perempuan walhi mencerminkan upaya kolektif dalam upaya pendampingan lingkungan dengan memperhatikan isu-isu lingkungan dan perjuangan untuk mendapatkan keadilan. Hal ini sesuai dengan teori ekofeminisme Vandana Shiva bahwa perjuangan untuk mendapatkan keadilan harus dilakukan dengan bersama-sama melibatkan masyarakat dan perempuan. Kampanye ini dapat melibatkan edukasi, penyuluhan, advokasi kebijakan, aktivisme masyarakat dan kolaborasi dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki tujuan yang sama. Tujuan utama kampanye lingkungan dalam ekofeminisme Vandana Shiva adalah untuk memperkuat peran perempuan dalam upaya pelestarian lingkungan. Kampanye lingkungan tidak hanya berfokus pada perlindungan fisik tetapi juga pada upaya untuk mengubah paradigma dan praktik yang merugikan baik perempuan maupun lingkungan.

6. Rilis Pers

Rilis Pers adalah suatu bentuk komunikasi yang digunakan oleh organisasi atau lembaga untuk menginformasikan dan menyebarluaskan berita atau pernyataan resmi kepada media massa dan masyarakat luas. Rilis pers bertujuan untuk mendapatkan liputan media, memperoleh perhatian publik dan mempengaruhi opini publik terkait isu lingkungan yang sedang terjadi. Seperti yang diungkapkan oleh Derra:

“Rillis Pers kami lakukan untuk membuat pernyataan resmi tentang kasus kerusakan lingkungan yang sedang terjadi dan kemudian kami sebarluaskan melalui media grup whatsapp, Instagram hingga jaringan pers”

Berdasarkan penuturan tersebut diketahui bahwa Rillis pers dilakukan oleh Perempuan Walhi untuk menyampaikan informasi atau pernyataan resmi tentang kasus kerusakan lingkungan yang sedang terjadi. Dalam upaya pendampingan lingkungan yang dilakukan oleh Perempuan walhi Jateng, kegiatan rillis pers digunakan sebagai alat komunikasi strategis dengan beberapa tujuan yaitu pemberitaan, meningkatkan kesadaran public, mempengaruhi opini publik, *media coverage*, dan penggalangan dukungan.

- a) Pemberitaan: Rillis pers digunakan untuk memberikan informasi factual tentang isu kerusakan lingkungan, seperti kasus pembangunan PLTP Dieng, kasus PLTSa Putri Cempo Surakarta, pembangunan PLTU Cilacap dll. Rillis pers ini memberikan gambaran jelas tentang masalah lingkungan yang sedang didampingi oleh perempuan Walhi Jateng tersebut.
- b) Kesadaran publik: Rillis pers digunakan perempuan Walhi Jateng untuk meningkatkan kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan yang dianggap mendesak dan perlu mendapatkan perhatian publik. Rillis pers ini berfungsi untuk menyampaikan pesan-pesan penting terkait kerusakan lingkungan dan implikasinya terhadap masyarakat
- c) Mempengaruhi opini publik: Rillis Pers digunakan Perempuan Walhi untuk mempengaruhi opini publik dan menciptakan dukungan terhadap perlindungan lingkungan. Dengan menyajikan argument yang kuat dan data yang relevan, rillis pers dapat membentuk opini dan memicu perubahan sikap serta tindakan yang positif dalam masyarakat.
- d) *Media Coverege*: Rillis pers efektif untuk memperoleh liputan media yang luas, sehingga mendapat audiens yang lebih besar. Melalui liputan media, pesan dan tuntutan perempuan Walhi Jateng tentang kasus kerusakan lingkungan yang sedang di dampingi dapat dijangkau oleh masyarakat yang lebih luas.

- e) Penggalangan dukungan: Perempuan Walhi Jateng menggunakan rillis pers sebagai alat untuk mengajak masyarakat atau kelompok lain, termasuk organisasi non pemerintah, akademisi, dan individu untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan advokasi lingkungan. Rillis per ini dapat mengkomunikasikan kebutuhan dan tuntutan yang spesifik serta meminta dukungan dan partisipasi aktif dalam upaya perlindungan lingkungan.

Rillis pers dilakukan untuk menyebarkan informasi, membangun kesadaran, mempengaruhi opini, public, mendapatkan liputan media dan memobilisasi dukungan dalam upaya pendampingan lingkungan yang dilakukan oleh perempuan walhi Jateng. Hal ini berkaitan dengan konsep ekofeminisme Vandana Shiva yang menyuarakan perlunya perubahan sistemik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Rillis pers yang dilakukan oleh perempuan Walhi Jateng dapat menggambarkan tuntutan mereka untuk perubahan kebijakan dan praktik pembangunan yang berkelanjutan, termasuk memperjuangkan hak-hak masyarakat, perlindungan masyarakat dan perlindungan ekosistem.

7. Pendidikan Kritis Lingkungan

Pendidikan kritis lingkungan merupakan forum untuk memberikan edukasi dan berbagi informasi serta pengalaman tentang fenomena kerusakan lingkungan. Pendidikan kritis lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan. Seperti yang diungkapkan oleh Laely yaitu:

“pendidikan kritis lingkungan merupakan salah satu strategi kami dalam memberikan edukasi ke masyarakat melalui forum-forum seperti diskusi, pelatihan pendidikan gender pendidikan tentang Hak akses manusia dll”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan kritis lingkungan dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas seperti pelatihan ataupun diskusi. Aktivis perempuan walhi membantu masyarakat dalam memahami hubungan antara eksploitasi sumber daya alam dan ketidakadilan sosial. Hal ini memungkinkan mereka dalam untuk mengidentifikasi kebijakan dan praktik yang mendukung kerusakan lingkungan serta memahami peran mereka dalam mengubah situasi tersebut.

Selain berasal dari undangan untuk menjadi narasumber atau pemantik, kegiatan pendidikan kritis lingkungan juga diadakan sendiri oleh Perempuan Walhi Jateng baik secara online maupun offline. Pendidikan kritis lingkungan oleh Perempuan Walhi Jateng telah banyak dilakukan diberbagai lokasi diantaranya kepada warga di kawasan Dataran tinggi Dieng antara lain Desa Bakal dan Desa Karangtengah yang merupakan daerah yang terdampak dari adanya pembangunan PLTP Dieng.

Salah satu pendidikan kritis lingkungan yang dilakukan perempuan Walhi yaitu mengadakan sekolah iklim. Sekolah iklim merupakan forum untuk memberikan edukasi dan berbagi informasi serta pengalaman tentang fenomena krisis iklim khususnya di wilayah Jawa Tengah yang diikuti oleh peserta yang berasal dari berbagai daerah. Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah menjadikan anak muda menjadi pilihan utama yang nantinya diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam mengawal fenomena krisis iklim ini untuk dapat dikurangi dan atau meminimalisir faktor penyebab parahnya krisis iklim. Untuk menunjang tujuan tersebut, berbagai macam materi diberikan, dari mulai materi pengantar krisis lingkungan, kebijakan iklim di Indonesia, keadilan untuk masyarakat terdampak krisis iklim hingga kampanye publik dalam isu krisis iklim.

Dari hasil sekolah iklim tersebut, terbentuklah Komunitas Generasi Peduli Iklim (GPI). GPI merupakan komunitas anak muda yang menaruh perhatian lebih dan berkecimpung dalam isu krisis iklim yang berupaya untuk mengurangi dan meminimalisirnya. Komunitas ini beranggotakan dari peserta Sekolah Iklim yang diadakan oleh WALHI Jawa Tengah. GPI tidak hanya berorientasi di lingkungan perikliman, namun turut membela masyarakat yang termarjinalkan, lemah ataupun dilemahkan sehingga dapat mewujudkan ekologi sosial yang bersih dan berkeadilan. Komunitas ini didirikan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang peduli akan krisis iklim serta mengurangi laju pemanasan global.

Walhi Jateng merupakan organisasi lingkungan yang berfokus pada advokasi dan pembelaan terhadap kerusakan lingkungan hidup di Jawa Tengah. Walhi Jateng memiliki visi dan misi yang kuat untuk memperjuangkan hak-hak lingkungan hidup yang adil, serta memperjuangkan hak-hak masyarakat adat, petani, dan nelayan dalam mengakses sumber

daya alam. Di Jawa Tengah, Walhi aktif bergerak dalam mengadvokasi hak-hak lingkungan hidup. Perempuan Walhi memiliki peran penting dalam upaya advokasi lingkungan Walhi Jateng karena terlibat langsung mulai dari tahap persiapan hingga melakukan aksi langsung didepan publik. Perempuan dan alam kodratnya memang tidak bisa dipisahkan, keduanya saling terhubung. Vandana Shiva (2005) menyebutkan kegiatan perempuan dalam menyiapkan pangan sebagai produksi kehidupan dan memandangnya sebagai hubungan yang benar-benar produktif dengan alam, karena perempuan tidak hanya mengumpulkan dan mengkonsumsi apa yang tumbuh di alam, tetapi mereka membuat segala sesuatu menjadi tumbuh. Proses pertumbuhan secara organis, yang didalamnya perempuan dan alam bekerja sama sebagai mitra, telah menciptakan suatu hubungan yang khusus antara perempuan dan alam. (Rinoza. 2016)

Hubungan perempuan dengan alam juga dapat dilihat dari kemiripan secara simbolik fungsional perannya dalam memproduksi dan mereproduksi kehidupan (Shiva, 1997:54-55). Perempuan memiliki kemiripan dengan alam (hutan) karena sama-sama memproduksi dan mereproduksi kehidupan. Secara simbolik organ reproduksi perempuan dalam beberapa hal memiliki fungsi yang mirip dengan eksistensi hutan. Rahim perempuan memungkinkan kehidupan menjadi ada, demikian juga keberadaan hutan memberikan ruang hidup bagi beraneka macam flora dan fauna. Hutan dan rahim perempuan sama-sama memberikan ruang bagi muncul, tumbuh dan berkembangnya kehidupan. Hutan dan rahim perempuan memberi fasilitas bagi kehadiran kehidupan baru. Keberadaan hutan dan rahim menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi kemunculan dan pertumbuhan kehidupan

Upaya pendampingan lingkungan yang dilakukan oleh perempuan Walhi Jateng dilihat dari pemikiran Ekofeminisme tidak terlepas dari kegelisahan perempuan terhadap praktek perusakan lingkungan dan ekologis yang berujung pada ketidakadilan gender. Upaya yang mereka lakukan mulai analisis kebijakan, *assesment*, kajian lingkungan, mengorganisir aksi, kampanye lingkungan, rillis pers dan pendidikan kritis lingkungan saling berkaitan satu sama lain dan menjadi sebuah strategi dalam membela keadilan. Adapun tujuan dari pendampingan lingkungan ini adalah untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari kegiatan eksploitasi yang mengancam kelestarian lingkungan hidup yang didominasi oleh kaum laki-laki.

B. Alasan Perempuan Walhi Melakukan Pendampingan Lingkungan

1. Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan dilakukan oleh Perempuan Walhi Jateng untuk memahami dampak kebijakan terhadap lingkungan dan masyarakat. Dengan menganalisis kebijakan, mereka dapat mengidentifikasi dampak kebijakan terhadap masyarakat dan lingkungan.

“analisis kebijakan penting untuk dilakukan selain untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap lingkungan juga untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan keadilan lingkungan”

Gambar. 6

Dokumentasi Wawancara Dengan Derra (Staf Advokasi dan Pengorganisasian Walhi Jawa Tengah)



Sumber: Dok. Pribadi

Berdasarkan pendapat Derra tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan perempuan walhi melakukan analisis kebijakan adalah untuk mengetahui dampak kebijakan terhadap lingkungan dan untuk mendorong kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan keadilan lingkungan. Analisis terhadap sebuah kebijakan sangat diperlukan agar memperoleh informasi yang diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang mumpuni (Wibowo, 2013). Hal ini sesuai dengan pendapat Vandana Shiva (2005) yang menyatakan bahwa deskripsi tentang bagaimana kebijakan dibuat dapat memberikan

informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang baik tentang hal-hal yang harus dilakukan ketika menganalisis kebijakan.

Badjuri dan Yuwono (2017) menyatakan ada 5 point utama mengapa analisis kebijakan tersebut penting untuk dilaksanakan: 1) Analisis kebijakan dilakukan melalui metode ilmiah yang bersifat obyektif, rasional dan saintifik. Hal ini mengisyaratkan apabila dilakukannya analisis kebijakan maka pembuatan kebijakan tersebut dilakukan secara ilmiah sehingga kebijakan tersebut dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan; 2) Analisis kebijakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan bersifat komprehensif akan menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga; 3) Analisis kebijakan merupakan hal yang bersifat multidimensioanl, interdependent (saling berkaitan), dan berkorelasi antara satu dengan yang lainnya sehingga menjadi sangat penting untuk dilaksanakan agar menghasilkan pengaruh yang menyeluruh; 4) Analisis kebijakan dapat menghasilkan panduan secara menyeluruh untuk melaksanakan kebijakan dan melakukan penilaian. Fakta ini dikarenakan analisis kebijakan dapat bersifat substansial dan strategik sehingga dapat digunakan pada masa yang akan datang; 5) Analisis kebijakan juga dapat memberikan kesempatan besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melahirkan kebijakan (*public partisipation*). Hal ini dikarenakan pada proses analisis kebijakan masyarakat dapat dijadikan sebagai objek yang digunakan untuk menggalang aspirasi.

Analisis kebijakan bermanfaat untuk menghindari adanya sebuah kebijakan yang diambil melalui pertimbangan yang gegabah atau pertimbangan yang dilandaskan oleh kekuasaan semata. Pertimbangan yang dilakukan secara ilmiah dengan pendekatan saintifik, obyektif dan rasional terkadang sulit untuk ditemukan (Tressa, 2015).

2. *Assesment*

Alasan perempuan Walhi Jateng melakukan *assessment* adalah untuk mengumpulkan data mengenai isu lingkungan yang terjadi di lapangan. Seperti yang diungkapkan oleh Patria Rizki Ananda

“*assessment* sangat penting bagi kami dalam advokasi lingkungan. Dengan melakukan *assessment* kami dapat memahami secara lebih mendalam masalah-masalah lingkungan yang terjad di lapangan. Dengan melakukan observasi,

wawancara, dan pengumpulan data untuk menganalisis kerusakan lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan informasi tersebut kami dapat memperkuat argumentasi, menyampaikan fakta yang jelas, dan dapat menyusun rencana strategi advokasi lebih lanjut”

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa *assessment* sangat penting dilakukan pada tahap awal dalam advokasi lingkungan. Melalui *assessment* perempuan walhi dapat memahami masalah-masalah lingkungan yang terjadi secara mendalam.

“ *assessment* memberi kami informasi yang lebih komprehensif tentang situasi lingkungan dilapangan dan permasalahannya. Kami dapat mengidentifikasi prioritas advokasi, menentukan target, dan merancang strategi yang efektif. Misalnya, melalui *assessment* kami mengetahui bahwa ada konflik horizontal antar masyarakat yang pro dan kontra pada pembangunan PLTP Dieng”

Gambar.7

Dokumentasi wawancara Dengan Patria Rizki Ananda
(Manajer kajian dan kampanye Walhi Jateng)



Sumber: Dok. Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan perempuan Walhi Jateng melakukan assesmen adalah untuk mendapatkan data dan pemahaman yang lebih mendalam tentang situasi lingkungan dan dampaknya untuk kemudian dapat merancang strategi advokasi yang efektif. *Assessment* yang dilakukan oleh perempuan

Walhi dapat memperkuat pemahaman tentang bagaimana praktik eksploitasi lingkungan berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama perempuan.

3. Kajian Lingkungan

Kajian lingkungan dilakukan perempuan walhi untuk memahami masalah lingkungan secara mendalam dengan kajian ilmiah.

“kami melakukan kajian lingkungan sebagai bagian dari upaya kami dalam memahami masalah lingkungan dengan lebih baik. Melalui kajian, kami mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi sumber masalah, mengukur dampaknya, dan merumuskan langkah-langkah yang tepat”

“hasil kajian lingkungan memberikan landasan yang kuat dalam upaya advokasi yang kami lakukan. Kajian lingkungan memperkuat argument kami dalam berdialog membela kepentingan masyarakat dan lingkungan serta mempengaruhi pengambilan keputusan”

Berdasarkan pendapat Laely tersebut dapat disimpulkan bahwa kajian lingkungan merupakan tahap penting yang harus dilakukan dalam advokasi lingkungan. Melalui kajian lingkungan mereka dapat mengidentifikasi secara mendalam tentang masalah lingkungan yang sedang terjadi mengukur dampaknya dan merumuskan langkah-langkah yang tepat dalam advokasi yang akan mereka lakukan.

4. Mengorganisir aksi

Aksi merupakan tindakan nyata yang penting dilakukan dalam upaya advokasi lingkungan seperti yang diungkapkan oleh Laely:

“Mengorganisir aksi penting kami lakukan sebagai bentuk ekspresi kami untuk memperkuat suara dan tuntutan kami terkait kasus kerusakan lingkungan. Melalui aksi, kami dapat menarik perhatian public dan pemerintah terhadap kasus yang kami perjuangkan”

“Mengorganisir aksi adalah cara kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu lingkungan yang kami perjuangkan. Kami mengedukasi masyarakat, menyebarkan informasi dan mengajak mereka untuk terlibat dalam perlindungan lingkungan. Kami ingin membangun kesadaran bahwa isu lingkungan adalah masalah bersama yang membutuhkan perhatian dan tindakan semua pihak. Dengan

membangun kesadaran masyarakat, kami berharap dapat membangun dukungan yang lebih kuat dan mendorong perubahan berkelanjutan.”

Gambar. 8

Dokumentasi wawancara dengan Laely
(Staf keuangan Walhi Jawa Tengah)



Sumber: Dok. Pribadi

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa mengorganisi aksi menjadi penting dilakukan untuk memperkuat suara dalam menyuarakan tuntutan-tuntutan untuk memperoleh perhatian public dan pemerintah. Dengan menggelar aksi perempuan Walhi berupaya mengajak dan membangun kesadaran masyarakat bahwa kerusakan lingkungan adalah masalah bersama dan membutuhkan tindakan dari semua pihak. Kegiatan aksi sosial membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat khususnya para korban ketidakadilan maupun korban yang terdampak dari aktivitas pembangunan yang merusak lingkungan. Mereka biasanya mendapatkan kompensasi ganti rugi dari perusahaan ataupun dari pemerintah yang diberikan secara langsung maupun melalui proses yang panjang. Selain itu melalui aksi kolektif ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan memicu keakraban antar warga misalnya masyarakat akan mempunyai program bersama untuk berkumpul membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan memecahkan persoalan bersama.

5. Kampanye lingkungan

Kampanye lingkungan dilakukan oleh perempuan Walhi untuk menggugah kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan yang mereka advokasi. Seperti yang diungkapkan oleh Derra:

“kami melakukan kampanye lingkungan sebagai upaya kami untuk menggugah kesadaran public tentang isu-isu lingkungan yang kami perjuangkan. Melalui kampanye kami dapat menyebarkan informasi dan fakta tentang urgensi perlindungan lingkungan. Kami ingin mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perubahan positif dan mengubah perilaku mereka yang dapat berdampak pada lingkungan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui alasan perempuan Walhi melakukan kampanye lingkungan yaitu untuk menggugah kesadaran masyarakat tentang isu-isu lingkungan, untuk menyebarkan informasi, fakta dan pemahaman tentang urgensi perlindungan lingkungan. Tujuan utama dari kampanye adalah menciptakan perubahan perilaku dan sikap masyarakat terhadap isu lingkungan. Kampanye lingkungan juga bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dan aksi masyarakat dalam advokasi lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh Derra:

“kampanye lingkungan adalah salah satu cara kami untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam merespon kerusakan lingkungan. Kami mengajak masyarakat untuk terlibat dalam aksi-aksi nyata yang mendukung perlindungan lingkungan. Kampanye membantu menggerakkan dan menginspirasi orang-orang untuk melakukan tindakan nyata demi lingkungan yang lebih baik.

Berdasarkan penuturan tersebut dapat disimpulkan bahwa alasan Perempuan Walhi melakukan kampanye lingkungan juga bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif dan aksi masyarakat. dengan melibatkan masyarakat melalui panggilan untuk tindakan, petisi, atau kegiatan partisipatif lainnya, perempuan walhi jateng ingin memobilisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam perlindungan lingkungan.

6. Rillis pers

Rillis pers merupakan alat penting dalam upaya pendampingan lingkungan yang dilakukan perempuan Walhi Jateng. Seperti yang disampaikan oleh Laely:

“kami melakukan rillis pers sebagai salah satu strategi kami untuk meningkatkan visibilitas isu lingkungan yang kami advokasi. Rillis pers

kami dapat menyampaikan informasi yang penting, fakta, dan analisis terkait masalah lingkungan kepada publik.

“Rilis pers adalah alat yang penting dalam membangun dukungan dan solidaritas terhadap isu-isu lingkungan yang kami perjuangkan. Melalui rilis pers kami juga dapat mengajak masyarakat, organisasi lain, dan media untuk mendukung dan bergabung dalam upaya advokasi lingkungan.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui alasan perempuan Walhi melakukan Rilis pers karena rilis pers merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan visibilitas isu lingkungan yang sedang terjadi. Dengan kekuatan media pers isu lingkungan akan lebih cepat menyebar dan mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Rilis pers menurut Laely juga strategi untuk membangun dukungan dan solidaritas terhadap isu kerusakan lingkungan yang sedang diperjuangkan.

7. Pendidikan kritis Lingkungan

Pendidikan kritis lingkungan dilakukan perempuan walhi Jateng dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran yang lebih dalam tentang isu-isu lingkungan di kalangan masyarakat.

“Pendidikan kritis lingkungan penting dilakukan, dengan banyak cara ada pemahaman soal lingkungan, ada pemahaman soal hak asasi manusia termasuk pemahaman soal gender dimana peran laki-laki dan perempuan itu setara”

“pemahaman soal gender penting dilakukan untuk mendorong perempuan percaya diri tampil didepan publik, jika perempuan sudah berani berbicara para laki-laki cenderung bisa menerima” .

“Biasanya kita turun ke lapangan selain untuk menggali masalah yang sedang terjadi kami juga menggali potensi perempuan, karena perempuan menjadi objek yang paling terdampak sekaligus mempunyai cara-cara yang unik untuk membela lingkungannya”

Apa yang diungkapkan oleh Derra tersebut sesuai dengan pendapat Vandana Shiva (2005) bahwa ada beberapa hukum tidak tertulis yang menyatakan bahwa laki-laki akan selalu mengizinkan perempuan untuk berjuang di garis depan dalam gerakan revolusi sosial, tetapi ketika mencapai kemenangan kaum laki-laki lah yang akan

memanennya sementara kaum perempuan kembali digeser ke posisi tradisional seperti semula dalam masyarakat patriarki

Ada banyak sekali alasan kerja-kerja advokasi lingkungan penting untuk dilakukan, berikut rangkuman hasil wawancara dengan ketiga aktivis perempuan Walhi Jateng yang menyebutkan beberapa alasan utama yang menjadi dasar Perempuan Walhi dalam melakukan advokasi lingkungan adalah: Munculnya permasalahan kemanusiaan dan kemiskinan yang terkait dengan perusakan lingkungan dan penguasaan sumberdaya alam, kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat tetapi malah berpihak pada kepentingan kuasa modal, keserakahan dan kekerasan terkait dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang semakin meningkat baik jumlah maupun skalanya, ancaman dan kerentanan akan munculnya bencana yang lebih besar di masa-masa mendatang. Beberapa alasan di atas memicu lahirnya kesadaran bagi Perempuan Walhi Jateng untuk melakukan pembelaan, perlawanan, dan perubahan atas ketidakadilan dan perusakan alam dan lingkungan. Salah satu bentuk perlawanan dan pembelaan tersebut adalah advokasi. Tujuan dari kerja-kerja advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atas sebuah kondisi yang tidak adil. Secara lebih spesifik, dalam praksisnya kerja advokasi diarahkan pada kebijakan publik yang dibuat oleh kuasa kebijakan (pemerintah).

BAB V
DAMPAK DILAKUKANNYA PENDAMPINGAN OLEH AKTIVIS
PEREMPUAN WALHI JAWA TENGAH

A. Dampak Lingkungan

Dampak pendampingan lingkungan memberikan kontribusi yang penting dalam mencegah kerusakan lingkungan, mengembalikan hak-hak lingkungan, dan memperjuangkan keadilan lingkungan.

Berikut beberapa dampak yang terjadi dengan adanya pendampingan terhadap lingkungan oleh perempuan walhi Jawa Tengah

1. Pelestarian lingkungan hidup

Pendampingan lingkungan yang dilakukan oleh perempuan Jateng telah berperan penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Melalui aksi kampanye dan penanaman pohon mereka berupaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan. Salah satu upayanya yaitu penanaman mangrove di Tambakrejo Semarang, Seperti yang dijelaskan oleh Patricia Rizki berikut:

“Kegiatan penanaman mangrove ini kami lakukan dalam rangka peringatan Hari Lingkungan Hidup Indonesia, tujuan dari aksi ini guna mencegah tenggelamnya sebagian pesisir Semarang-Demak, imbas sejumlah factor diantaranya tanah *alluvial* dipesisir Semarang-Demak yang cukup lunak, pengembangan pelabuhan yang membikin longsor di bawah permukaan laut, ekstraksi air tanah, dan proyek pembangunan industri yang mengikis hutan mangrove. Aksi ini kami lakukan bersama komunitas dan organisasi pecinta alam di Semarang serta warga Tambakrejo”

Gambar. 9

Aksi penanaman mangrove di Tambakrejo Semarang.



Sumber: Dok. Walhi Jateng

Dalam serangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Walhi Jateng bersama berbagai macam organisasi pecinta alam di Semarang dan remaja kampung Tamkbakrejo melakukan penanaman 1.000 bibit mangrove dan Forum rakyat di kampung Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Tujuan dilakukan penanaman mangrove ini untuk mencegah tenggelamnya sebagian pesisir Semarang-Demak. Selain itu berdasarkan lampiran Peraturan Gubernur Jawa Tengah, kondisi mangrove di Kota Semarang termasuk dalam kategori rusak bersama dengan kabupaten Rembang, Pati, Demak, Kendal dan daerah lainnya.

Selain berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem yang rentan terhadap kerusakan. Perempuan Walhi juga membantu masyarakat dalam memahami pentingnya pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan melalui pendidikan kritis lingkungan yang dilakukan pada masyarakat yang daerahnya terdampak eksploitasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Shiva (2005) bahwa perempuan memiliki pemahaman dan hubungan yang lebih dekat dengan alam, dan oleh karena itu, mereka memiliki peran penting dalam melindungi dan melestarikan lingkungan. Aksi penanaman mangrove yang dilakukan oleh Perempuan Walhi dengan melibatkan organisasi pecinta alam dan elemen masyarakat ini juga telah menciptakan solidaritas ekologis dalam upaya pelestarian lingkungan dan

mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Solidaritas ekologis menunjukkan pentingnya hubungan timbal balik antara manusia dan alam serta pentingnya solidaritas antar manusia dalam menjaga kelestarian lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa perjuangan untuk memperjuangkan keadilan sosial dan lingkungan harus melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan masyarakat adat. Dengan membangun solidaritas ekologis, gerakan Perempuan Walhi Jateng dalam upaya pelestarian lingkungan melalui penanaman dapat saling memperkuat dan mendukung dalam mengampanyekan merawat dan melestarikan lingkungan.

2. Pengurangan sampah

Permasalahan sampah hingga saat ini menjadi masalah besar terhadap kualitas lingkungan hidup yang belum ada solusi konkret untuk mengatasinya. Sampah plastik merupakan sampah yang paling berbahaya terhadap pencemaran lingkungan karena selain mengandung bahan berbahaya juga sangat sulit untuk terurai. Dalam pengendalian kantong plastik, pemerintah kota Semarang telah mengeluarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pengendalian Penggunaan Plastik. Namun demikian, implementasi dari perwal ini belum efektif dalam pengurangan sampah plastik di Kota Semarang dan hanya menjadi angin lalu saja. Baik para konsumen maupun pelaku usaha masih mengandalkan kantong plastik dalam praktiknya. Oleh sebab itu, kampanye dan gerakan pengurangan penggunaan kantong plastik sekali pakai harus terus dilakukan untuk memberikan edukasi dan informasi, serta menumbuhkan kesadaran produsen dan konsumen agar memulai meninggalkan plastik sekali pakai.

Berdasarkan permasalahan tersebut Aktivistis Perempuan Walhi Jateng bersama dengan organisasi pecinta alam di Semarang melakukan aksi kampanye mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai di kota Semarang. Aksi ini dilakukan pada momentum Peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia pada tanggal 2-5 juli 2022. Berikut penjelasan oleh Derra:

“kami melakukan serangkaian kegiatan peringatan Hari Bebas Kantong Plastik Sedunia yang dilaksanakan pada tanggal 2, 4 dan 5 juli 2022. Tujuan

utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Semarang mengenai kondisi sampah plastik di Kota Semarang. Selain itu tujuan lain dari aksi ini adalah memberikan informasi mengenai bahaya penggunaan plastic sekali pakai bagi lingkungan serta mengajak masyarakat Kota Semarang untuk menyingkirkan penggunaan plastic sekali pakai”

“kegiatan diawali dengan membagi-bagikan *goodie bag* secara gratis kepada pengunjung daerah Kota Lama Semarang pada tanggal 2 juli. Kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan mengadakan webinar yang berjudul Kebijakan dan Implementasi Pengelolaan Sampah Plastik di Kota Semarang. Kemudian kegiatan ini ditutup dengan membagi-bagikan *goodie bag* di dua pasar tradisional di Kota Semarang”

Berdasarkan penjelasan Derra tersebut dapat diketahui bahwa Perempuan Walhi melalui aksi kampanye pengurangan sampah plastik tersebut berupaya untuk mengurangi sampah plastik di kota Semarang dengan membagikan *goodie bag* atau tas kain ramah lingkungan yang dapat digunakan kembali. Upaya perempuan Walhi tersebut telah mencerminkan nilai-nilai ekofeminisme, perempuan seringkali menjadi pengelola sumber daya alam dan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, tetapi mereka juga mengalami dampak paling buruk dari kerusakan lingkungan. Vandana Shiva (2005) berpendapat bahwa perempuan seringkali secara historis bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam, seperti air, tanah, dan pangan. Dalam teori ekofeminisme Vandana Shiva, kepentingan ganda perempuan terkait dengan keberlanjutan lingkungan. Perempuan tidak hanya memiliki kepentingan pribadi dalam menjaga lingkungan yang sehat dan berkelanjutan bagi diri mereka dan keluarga mereka, tetapi juga memiliki kepentingan kolektif dalam menjaga keseimbangan ekologis bagi keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kegiatan terkait lingkungan yang dilakukan Perempuan Walhi ini memang tidak terlepas dari kepentingan mereka sebagai perempuan yang dalam berbagai mitos sering dianggap sebagai pihak yang memproduksi sampah terbesar. Memang secara historis dan kultural konstruksi masyarakat di Indonesia, khususnya di Kota Semarang menempatkan perempuan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam urusan

domestik yang sekali lagi dimitoskan sebagai ruang yang terkait dengan proses produksi sampah rumah tangga. Atas dasar itu pula sekiranya kegiatan-kegiatan tentang lingkungan yang dilakukan oleh perempuan Walhi menyoal ibu-ibu rumah tangga dan juga anak-anak. Dalam hal ini, anak-anak harus diberikan edukasi sejak dini agar ke depannya diharapkan mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang sadar lingkungan.

3. Mencegah banjir

Curah hujan ekstrem dan minimnya luasan RTH (ruang terbuka hijau) di Kota Semarang ditengarai menjadi beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya banjir bandang di Kota Semarang bulan Februari lalu.

“saat ini kita sudah dilanda krisis iklim yang ditandai dengan meningkatnya curah hujan ekstrem. Salah satu solusi banjir yang terjadi di Kota Semarang adalah dengan menyediakan RTH yang merata dan seluas mungkin dengan kualitas yang baik”

Menurut pendapat Laely tersebut dapat diketahui bahwa dengan menyediakan RTH yang merata dapat mencegah banjir karena tumbuhan dapat membantu menyerap air ke dalam tanah sehingga air hujan yang turun tidak langsung menyebabkan banjir. Dalam undang-undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, diatur bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit seluas 30% dari luas wilayah kota. Hasil studi Sudarwani & Ekaputra (2017) menunjukkan bahwa dari 16 wilayah kecamatan di Kota Semarang terdapat 8 kecamatan yang persentase luasan RTH nya kurang dari 30% yaitu Kecamatan Gajah Mungkur, Candisari, Pedurungan, Gayamsari, Semarang Timur, Semarang Utara, Semarang Tengah, Semarang Barat. Hal tersebut kemudian diperparah dengan berkurangnya luasan RTH di wilayah penyangga seperti Banyumanik, Tembalang, Gunung Pati, dan Mijen. RTH di keempat kecamatan tersebut telah banyak berubah menjadi pemukiman, pusat perbelanjaan, dan kawasan industri. Oleh sebab itu upaya pendampingan yang dilakukan oleh Perempuan Walhi melalui advokasi kebijakan berupaya untuk (1) meningkatkan kembali jumlah RTH di wilayah penyangga (Kec. Banyumanik, Tembalang, Gunungpati, dan Mijen) dan melakukan pemerataan RTH minimal seluas 30% di setiap kecamatan yang masih

kurang luasan RTH nya, (2) Pemenuhan kewajiban wilayah RTH seluas 30% dan merata disetiap kecamatannya.

Upaya tersebut dilakukan tidak hanya dapat mencegah banjir tetapi juga merupakan salah satu upaya mitigasi krisis iklim. Pro dan kontra terkait dengan dimensi gender akibat dari banjir masih sering terjadi di masyarakat. Di masyarakat terkadang ada perbedaan pandangan terkait dengan intensitas yang menjadi korban banjir. Sebagian anggota masyarakat yang memiliki pandangan dampak negatif banjir dirasakan secara universal, merata dan tanpa membedakan jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), usia (tua atau muda), maupun status (kaya atau miskin). Banjir merugikan siapa saja tanpa pandang bulu. Pandangan tersebut ada benarnya, namun apabila ditinjau secara lebih mendalam perempuan merupakan pihak yang lebih banyak dirugikan sekaligus menerima dampak negatif yang lebih besar akibat banjir. Perempuan harus menanggung beban penderitaan yang lebih berat pada saat terjadi banjir. Shiva memiliki pandangan kaum perempuan merupakan pihak yang paling terpuak akibat kerusakan ekologis karena: pertama, mereka yang paling miskin diantara yang termiskin, dan kedua karena bersama alam mereka berperan selaku penopang utama masyarakat (Shiva, 1997:7). Kebutuhan air yang bersih dan sehat perempuan lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Pada saat perempuan mengalami masa menstruasi seiring dengan keluarnya darah tubuh membutuhkan zat cair yang lebih banyak dibandingkan dengan hari hari biasa. Menstruasi merupakan bawaan kodrat perempuan yang selalu akan dialami setiap bulan mengikuti ritme perkembangan biologis. Hanya perempuanlah yang mengalami menstruasi sedangkan laki-laki tidak. Kekurangan air pada saat perempuan mengalami menstruasi akan dapat menimbulkan gangguan kesehatan pada perempuan.

B. Dampak Sosial Masyarakat

1. Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat

Pendampingan lingkungan yang dilakukan oleh aktivis perempuan Walhi Jateng juga memberikan dampak positif dalam meningkatkan partisipasi dan memberdayakan masyarakat dalam mencegah kerusakan lingkungan. Seperti yang diungkapkan oleh Patria Rizki:

“kami selalu mengajak masyarakat untuk ikut andil dalam setiap aksi yang kami lakukan agar masyarakat dapat memahami permasalahan lingkungan

yang sedang terjadi dan memahami hak-hak yang mereka miliki, nantinya kami mengharapkan masyarakat dapat mandiri dalam menghadapi masalah yang terjadi dengan membuat perkumpulan untuk mencari solusi bersama”

Melalui kegiatan penyuluhan, kampanye, dan perlibatan langsung dengan masyarakat, aktivis perempuan membangun kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dan mengatasi tantangan ekologis. Dampaknya adalah peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam aksi kolektif untuk melindungi lingkungan hidup. Menurut priyono (2004) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Dalam kerangka pikiran itu, upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi;

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang

tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*) karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

2. Meningkatnya kesadaran kritis masyarakat tentang politik dan keadilan lingkungan.

Melalui kegiatan pendidikan kritis lingkungan perempuan walhi berupaya untuk menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan, memahami tentang isu kerusakan lingkungan yang terjadi di daerahnya, memahami tentang hak asasi manusia, memahami tentang kesetaraan gender. Perempuan Walhi mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungannya dan.. menolak semua upaya pembangunan yang berdampak pada kerusakan lingkungan di daerahnya. Dampaknya masyarakat akan lebih peka terhadap isu-isu pembangunan dan melakukan mitigasi dengan melakukan penjagaan dan membuat kelompok-kelompok yang peduli lingkungan di daerahnya masing-masing. Seperti yang dijelaskan oleh Derra:

“Dengan adanya pendidikan kritis lingkungan, masyarakat menjadi sadar terhadap bahaya dari dampak kerusakan lingkungan yang mengancam kehidupan mereka. seperti yang terjadi pada masyarakat Wadas Purworejo yang menolak penambangan di tanah mereka untuk pembangunan Bendungan Benner, mereka berani menolak semua upaya dan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada mereka. mereka membentuk kelompok-kelompok yang bernama Gempa Dewa dan Wadon Wadas untuk menjadi wadah mereka dalam melakukan penolakan dan memperjuangkan keadilan atas kehidupan mereka”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat diketahui bahwa dengan pendidikan kritis lingkungan yang dilakukan oleh Aktivis Perempuan Walhi Jateng dapat berdampak penting dalam upaya perjuangan masyarakat untuk memperoleh keadilan lingkungan.

Beberapa dampak pentingnya kesadaran kritis masyarakat tentang keadilan lingkungan yaitu (1) Memahami dampak lingkungan. Dengan kesadaran kritis masyarakat memantu mereka memahami dampak dari aktivitas manusia terhadap lingkungan. Ini mencakup pemahaman tentang degradasi lingkungan, perubahan iklim, polusi, deforestasi, dan masalah ekologis lainnya. Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat mengenali konsekuensi dari tindakan mereka terhadap lingkungan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meminialkan dampak negative. (2) Mengatasi ketidakadilan lingkungan. Kesadaran kritis memungkinkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan mengatasi ketidakadilan dalam distribusi kerugian dan manfaat lingkungan. Hal ini melibatkan pengakuan terhadap kesenjangan sosial-ekologis, di mana kelompok masyarakat tertentu lebih rentan terhadap dampak lingkungan yang merugikan. Kesadaran ini memicu tindakan untuk memperjuangkan kesetaraan akses terhadap sumber daya alam, lingkungan yang bersih dan sehat, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan lingkungan. (3) Mempertanyakan Model Pembangunan: Kesadaran kritis tentang keadilan lingkungan mendorong masyarakat untuk mempertanyakan dan mengevaluasi model pembangunan yang berdampak negatif pada lingkungan dan kelompok masyarakat tertentu. Hal ini melibatkan kritis terhadap praktik industri yang merusak lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, polusi, dan degradasi ekosistem. Dengan kesadaran kritis ini, masyarakat dapat memperjuangkan alternatif pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

(4) Memperjuangkan Perubahan Sistemik: Kesadaran kritis tentang keadilan lingkungan mendorong masyarakat untuk memperjuangkan perubahan sistemik yang melibatkan partisipasi aktif dalam gerakan lingkungan dan advokasi. Dengan memahami pentingnya keadilan lingkungan, masyarakat menjadi lebih terampil dalam mengadvokasi kebijakan dan tindakan yang mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan lingkungan. Masyarakat yang sadar secara kritis juga berpotensi mengubah perilaku konsumsi mereka menuju pola hidup yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kesadaran kritis masyarakat tentang keadilan lingkungan merupakan langkah awal yang penting dalam mencapai perubahan menuju masyarakat yang lebih berkelanjutan, adil, dan ramah lingkungan. Dengan pemahaman dan

kesadaran ini, masyarakat dapat mengambil tindakan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dan berpartisipasi dalam upaya kolektif untuk mencapai keadilan sosial dan lingkungan.

3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan

Pendampingan lingkungan oleh aktivis perempuan Walhi Jateng berkontribusi pada pemberdayaan perempuan di dalam masyarakat. seperti yang diungkapkan oleh Derra:

“setiap kami terjun ke lapangan selain menggali masalah lingkungan kami juga menggali potensi perempuan dimana perempuan selalu mempunyai keterkaitan yang lebih dekat dengan lingkungan mereka mempunyai cara-cara unik untuk membela lingkungannya”

Aktivis Perempuan Walhi memberikan pelatihan, pendidikan dan dukungan kepada perempuan untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kepercayaan diri dalam menghadapi isu-isu lingkungan. Aktivis perempuan walhi memandang bahwa pemahaman ekofeminisme dapat membantu mereka dalam melawan berbagai bentuk eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan lingkungan. Mereka percaya bahwa perempuan memiliki perspektif unik dan nilai-nilai yang berbeda yang dapat berkontribusi secara positif dalam mengatasi masalah lingkungan Dampaknya adalah peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan terkait lingkungan. Hal ini sejalan dengan teori ekofeminisme Vandana Shiva (2005) yang menekankan perlunya kesetaraan gender dalam upaya perlindungan lingkungan.

Menginisiasi pendirian bank sampah menjadi salah satu strategi yang dirasa sesuai dan kontekstual dengan situasi dan keadaan sosial masyarakat di Jawa Tengah. Nilai ekonomi yang didapatkan dari kegiatan menabung sampah dirasa cukup berhasil dalam menggerakkan (terutama) ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak untuk merasa bertanggung jawab dengan jumlah dan jenis produksi sampah yang dihasilkan di rumah mereka masing-masing. Selain karena memang sampah di Jawa Tengah telah menjadi persoalan bersama, kedekatan ibu rumah tangga terhadap persoalan sampah telah membuat perempuan Walhi tergerak untuk melakukan kegiatan serupa di berbagai daerah yang terdampak kerusakan lingkungan. Sebagai seorang perempuan mereka

mempunyai perspektif yang sama tentang bagaimana cara untuk memanfaatkan dan mengelola sampah yang diproduksi di tingkat rumah tangga. Perspektif yang sedikit banyak membuat masyarakat terutama ibu-ibu dapat ikut terlibat dalam program pengelolaan sampah. Aktivis Perempuan Walhi percaya jika para ibu di masing-masing keluarga sudah terlibat akan lebih mudah untuk mengajak anggota keluarga lainnya untuk terlibat dalam hal yang sama.

Pemberdayaan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam advokasi lingkungan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pemberdayaan perempuan penting dalam advokasi lingkungan: (1) Perspektif yang beragam: Pemberdayaan perempuan memastikan keterlibatan dan peningkatan perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan lingkungan. Ini memberikan perspektif yang beragam dan menyeluruh dalam mengatasi isu-isu lingkungan. Wanita seringkali memiliki pemahaman yang unik tentang lingkungan karena keterikatannya dengan alam dan peran yang mereka mainkan dalam pengelolaannya. Dengan mengintegrasikan perspektif ini, advokasi lingkungan menjadi lebih holistik dan berkelanjutan. (2) Perlindungan sumber daya alam: Perempuan secara tradisional bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam di banyak masyarakat. Pemberdayaan perempuan memperkuat peran ini dan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan. Ketika perempuan memiliki kontrol yang lebih besar atas sumber daya alam, mereka cenderung lebih berkepentingan dalam melindungi dan melestarikan lingkungan.

(3) Keadilan gender: Pemberdayaan perempuan dalam advokasi lingkungan juga berkontribusi pada pencapaian keadilan gender. Dalam banyak komunitas, perempuan seringkali menjadi kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan lingkungan dan bencana alam. Dengan memberdayakan perempuan secara ekonomi, sosial, dan politik, mereka dapat lebih baik mengatasi ketidaksetaraan dan kekerasan gender yang terkait dengan lingkungan. Pemberdayaan perempuan juga memperkuat perjuangan untuk hak-hak perempuan dan menghilangkan diskriminasi dalam konteks lingkungan. Dalam teori ekofeminisme Vandana Shiva (2005), pemberdayaan perempuan adalah kunci dalam perjuangan untuk keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan lingkungan. Memahami keterkaitan antara pembebasan perempuan dan keberlanjutan

lingkungan menjadi penting untuk membangun masyarakat yang adil, berkelanjutan, dan ramah lingkungan

4. Membentuk jaringan dan meningkatkan solidaritas

Jaringan dalam advokasi lingkungan merujuk pada koneksi yang dibangun antara individu, organisasi dan kelompok yang memiliki minat dan tujuan yang sama dalam melindungi dan memperbaiki lingkungan. Jaringan dan solidaritas memiliki peran penting dalam upaya perlindungan lingkungan. Jaringan dan solidaritas dapat memungkinkan pertukaran informasi, kolaborasi dan aksi kolektif yang lebih efektif. Pendampingan lingkungan oleh aktivis perempuan Walhi Jateng menciptakan jaringan dan solidaritas antara perempuan dan komunitas lokal. Melalui kerja sama dan kolaborasi dengan organisasi lokal dan masyarakat setempat, aktivis perempuan memperkuat suara perempuan dalam melawan eksploitasi alam dan mencapai keadilan lingkungan. Dampaknya adalah terbentuknya jaringan yang kuat untuk mendukung, berbagi pengetahuan dan memperjuangkan hak-hak perempuan dan keberlanjutan lingkungan.

C. Dampak Ekonomi

1. Peningkatan nilai ekonomi produk lokal

Upaya pendampingan yang dilakukan perempuan Walhi tidak hanya membahas masalah lingkungan hidup saja. Mereka juga menggali semua potensi yang ada pada masyarakat termasuk potensi ekonomi yang ada di masyarakat melalui pemetaan ekonomi produk lokal untuk mengetahui potensi-potensi yang ada daerah dan sumber daya alam yang dimiliki. Dengan mengetahui potensi produk lokal, maka potensi ekonomi dan sumber daya manusia dapat dimaksimalkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. seperti yang diungkapkan oleh Derra berikut:

“maksud dari mengetahui potensi ekonomi produk lokal adalah dengan mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk lokal menjadi nilai ekonomi dan membantu ekonomi masyarakat”

Pemetaan potensi ekonomi lokal dilakukan perempuan Walhi Jateng dengan mengidentifikasi potensi ekonomi di daerah, identifikasi tersebut meliputi identifikasi potensi sektoral sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi yang ada, dan modal dimana semua itu mencakup sektor pertanian, perkebunan, pariwisata, dan

sektor-sektor lainnya yang berpotensi untuk meningkatkan perekonomian daerah. Dalam melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal, perempuan Walhi menggunakan analisis *SWOT* karena mudah dilakukan. Seperti yang diungkapkan oleh Derra:

“analisis *SWOT* sering kami lakukan untuk memetakan potensi ekonomi di daerah karena sangat mudah dipahami jika dilakukan dalam tingkat komunitas, terutama masyarakat pedesaan”

Salah satu pemetaan potensi ekonomi lokal yang didampingi oleh Perempuan Walhi Jateng yaitu pada masyarakat Tambakrejo, Semarang. Tambakrejo merupakan daerah pesisir yang ada di utara Kota Semarang yang beberapa tahun lalu terkena dampak penggusuran oleh pemerintah sehingga banyak mendapatkan perhatian oleh para aktivis di Kota Semarang sehingga sekarang mendapatkan rumah hunian sementara yang bangun oleh pemerintah. Masyarakat Tambakrejo mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan sehingga potensi yang dapat dipetakan adalah produk olahan ikan salah satunya ikan asap.

Dalam proses meningkatkan nilai ekonomi produk lokal tersebut Perempuan Walhi melakukan beberapa langkah pendampingan yaitu; (1) Peningkatan kualitas produksi. Dalam kegiatan produksi, kualitas bahan baku sangat dibutuhkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan persaingan pasar dan memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu Perempuan Walhi mendorong dan membantu masyarakat untuk meningkatkan produksi ikan asap. (2) Memperbanyak inovasi produk olahan ikan. Salah satu kelemahan masyarakat adalah belum mampu mengolah komoditas utama menjadi produk turunan, sehingga mereka tidak dapat memaksimalkan keuntungan secara maksimal. Oleh karena itu Perempuan Walhi membuat berbagai macam pelatihan untuk membekali masyarakat memperbanyak inovasi untuk produk unggulan. (3) Penguatan promosi penjualan. Untuk meningkatkan penjualan terhadap produk yang dipasarkan diperlukan penguatan promosi penjualan. Promosi dapat dilakukan dengan memberi kemasan dan label pada produk yang dijual dan mengenalkan produk-produk pada acara-acara kedaerahan. Promosi penjualan juga dilakukan dengan menggunakan media sosial yang ada untuk meningkatkan penjualan.

2. Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan upaya yang dilakukan Perempuan Walhi untuk memberdayakan usaha mikro yang ada di masyarakat melalui bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini Perempuan Walhi melakukan pendampingan pada UMKM yang ada di Tambakrejo yaitu UMKM UD. Mina Makmur. Berikut beberapa langkah yang dilakukan Aktivist Perempuan Walhi Jateng dalam mengembangkan UMKM UD. Mina Makmur di Tambakrejo berdasarkan hasil rangkuman wawancara dan dokumen laporan kegiatan Walhi Jateng dengan Patricia Rizki Ananda:

1) Kemudahan dalam Akses Permodalan

Salah satu permasalahan yang dihadapi UMKM UD. Mina Makmur di adalah aspek permodalan. Lambannya akumulasi kapital di kalangan pengusaha mikro, kecil, dan menengah, merupakan salah satu penyebab lambannya laju perkembangan usaha dan rendahnya surplus usaha di sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Faktor modal juga menjadi salah satu sebab tidak munculnya usaha-usaha baru di luar sektor ekstraktif. Oleh sebab itu dalam pemberdayaan UMKM pemecahan dalam aspek modal ini penting dan memang harus dilakukan.

2) Bantuan Pembangunan Prasarana

Usaha mendorong produktivitas dan mendorong tumbuhnya usaha, tidak akan memiliki arti penting bagi masyarakat, kalau hasil produksinya tidak dapat dipasarkan, atau walaupun dapat dijual tetapi dengan harga yang amat rendah. Oleh sebab, itu komponen penting dalam usaha pemberdayaan UMKM UD. Mina Makmur adalah pembangunan prasarana produksi dan pemasaran. Tersedianya prasarana pemasaran dan atau transportasi dari lokasi produksi ke pasar, akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan petani dan pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah.

3) Pengembangan Skala Usaha

Pemberdayaan ekonomi pada masyarakat lemah, pada mulanya dilakukan melalui pendekatan individual. Kemudian jika pendekatan individual ini tidak

memberikan hasil yang memuaskan, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kelompok. Melalui kelompok, mereka dapat membangun kekuatan untuk ikut menentukan distribusi. Pengelompokan atau pengorganisasian ekonomi diarahkan pada kemudahan untuk memperoleh akses modal ke lembaga keuangan yang telah ada, dan untuk membangun skala usaha yang ekonomis. Aspek kelembagaan yang lain adalah dalam hal kemitraan antar skala usaha dan jenis usaha, pasar barang, dan pasar input produksi. Aspek kelembagaan ini penting untuk ditangani dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat.

4) Pengembangan Jaringan Usaha, Pemasaran dan Kemitraan Usaha

Upaya mengembangkan jaringan usaha ini dapat dilakukan dengan berbagai macam pola jaringan misalnya dalam bentuk jaringan sub kontrak maupun pengembangan kluster. Pola-pola jaringan semacam ini sudah terbentuk akan tetapi dalam realitasnya masih belum berjalan optimal. Pola jaringan usaha melalui sub kontrak dapat dijadikan sebagai alternatif bagi eksistensi UMKM di Indonesia.

5) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting bagi setiap usaha termasuk juga di sektor usaha kecil. Keberhasilan industri skala kecil untuk menembus pasar global atau menghadapi produk-produk impor di pasar domestik ditentukan oleh kemampuan pelaku-pelaku dalam industri kecil tersebut untuk mengembangkan produk-produk usahanya sehingga tetap dapat eksis. Kelemahan utama pengembangan usaha Mikro, kecil, dan Menengah di Indonesia adalah karena kurangnya ketrampilan sumber daya manusia. Manajemen yang ada relatif masih tradisional. Oleh karena itu, dalam pengembangan UMKM perlu meningkatkan pelatihan baik dalam aspek kewiraswastaan, administrasi dan pengetahuan serta ketrampilan dalam

Melalui dampak-dampak tersebut, pendampingan lingkungan oleh aktivis perempuan Walhi Jateng memberikan kontribusi yang penting dalam membangun kesadaran, perlindungan lingkungan dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Dampak-dampak tersebut mencerminkan pentingnya peran aktivis

perempuan dalam upaya advokasi lingkungan dan bagaimana nilai-nilai ekofeminisme diimplementasikan secara nyata. Pendampingan lingkungan oleh aktivis perempuan juga memiliki efek jangka panjang yang dapat mempengaruhi keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan memberdayakan perempuan dan melibatkan mereka secara aktif dalam advokasi lingkungan, aktivis perempuan menciptakan iklim yang lebih inklusif, dimana perempuan memiliki peran penting dalam upaya advokasi lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam.

Selain itu, melalui pendampingan lingkungan, aktivis perempuan Walhi Jateng juga membangun kesadaran akan hubungan yang kompleks antara gender dan lingkungan. Mereka menyadari bahwa perempuan seringkali lebih tergantung pada sumber daya alam untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka, seperti air, pangan, dan energi. Oleh karena itu, perlindungan lingkungan juga berarti melindungi kepentingan dan kesejahteraan perempuan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendampingan lingkungan oleh perempuan Walhi Jateng memiliki peran penting dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan dengan mengimplementasi nilai-nilai Ekofemisme Vandana Shiva.
2. Upaya pendampingan lingkungan yang dilakukan oleh perempuan Walhi Jateng dilihat dari pemikiran Ekofeminisme tidak terlepas dari kegelisahan perempuan terhadap praktek perusakan lingkungan dan ekologis yang berujung pada ketidakadilan gender. Upaya yang mereka lakukan meliputi analisis kebijakan, *assesment*, kajian lingkungan, mengorganisir aksi, kampanye lingkungan, rillis pers dan pendidikan kritis lingkungan saling berkaitan satu sama lain dan menjadi sebuah strategi dalam upaya advokasi lingkungan.
3. Ada banyak sekali alasan kerja-kerja advokasi lingkungan penting untuk dilakukan. Alasan utama yang menjadi dasar Perempuan Walhi dalam melakukan advokasi lingkungan adalah: Munculnya permasalahan kemanusiaan dan kemiskinan yang terkait dengan perusakan lingkungan dan penguasaan sumberdaya alam, kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat tetapi malah berpihak pada kepentingan kuasa modal, keserakahan dan kekerasan terkait dengan lingkungan dan sumberdaya alam yang semakin meningkat baik jumlah maupun skalanya, ancaman dan kerentanan akan munculnya bencana yang lebih besar di masa-masa mendatang
4. Dampak dari adanya pendampingan lingkungan oleh perempuan meliputi dampak lingkungan, dampak sosial dan dampak ekonomi. Dampak terhadap lingkungannya yaitu pelestarian lingkungan hidup, mengurangi sampah, dan mencegah banjir. Dampak sosialnya yaitu meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, meningkatnya kesadaran kritis masyarakat, membentuk

jaringan dan meningkatkan solidaritas. Dampak ekonominya yaitu peningkatan nilai ekonomi produk lokal dan mengembangkan UMKM.

B. Saran

1. Penguatan peran dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan menentukan langkah dan strategi yang efektif dalam advokasi lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan ruang yang lebih luas kepada perempuan dalam proses pengambilan keputusan.
2. Aktivis Perempuan Walhi Jateng dapat mengembangkan program pelatihan dan penguatan kapasitas untuk meningkatkan keterampilan advokasi, kepemimpinan dan manajemen aksi bagi perempuan yang terlibat dalam advokasi lingkungan. Hal ini akan membantu mereka menjadi lebih efektif dalam mempengaruhi perubahan positif dalam advokasi lingkungan.
3. Mengintensifkan pendidikan kritis lingkungan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu lingkungan dan peran perempuan dalam advokasi lingkungan
4. Mengembangkan jaringan dengan komunitas-komunitas lokal untuk memperkuat strategi advokasi lingkungan dan memperluas dampaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Shiva, Vandana. 2005. *Ekofeminisme; Persepektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*, Yogyakarta: IRE Press
- Shiva, V. dan M. Mies, 1993. *Ekofeminisme: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Diterjemahkan oleh Kelik Ismunanto & Lilik, 2005, IRE Press, Yogyakarta
- Suliantoro, Bernandus Wibowo & Murdiati, caritas Woro. 2009. *Perjuangan Perempuan Mencari Keadilan dan Menyelamatkan Lingkungan. Telaah Kritis Etika Ekofeminis Vandana Shiva*. Yogyakarta: Cahaya Atma Putaka.
- Suliantoro, Bernadus Wibowo. 2014. *Etika Ekofeminis Vandana Shiva dan Karen. J. Warren Sebagai Landasan Untuk Merekonstruksi Etika Lingkungan di Indonesia*. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada
- Arikunto, S., 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan dan Praktid*. Bandung: Rosdakarya.
- Ritzer, G., 2003. *Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra. I. W. 2018 *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan keagamaan*. Bandung Nilacakra
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Moeloeng, L., 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Suryabrata, S., 1998. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo
- Neuman, W. Lawrence. 2013. *Metode Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks.
- Soekanto. S. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada.
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*, (Terj.) Yogyakarta: Resist Book.

- Sukmana, Oman. 2016. *Konsep dan Teori Gerakan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing).
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Sumarwoto. 2009. *Analisi Mengenai Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Kementerian Lingkungan Hidup UU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Laporan Konsultasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) Walhi Jawa Tengah 2022
- Laporan Kajian Lingkungan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) . 2022
- Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2002. “*Ekofeminisme dan Peran Perempuan dalam Lingkungan*”. Indonesian journal of Conservation Vol. 1 No. 1 17-23
- Arivia, Gadis. 2002. “*Ekofeminisme:Lingkungan Hidup Berurusan dengan Perempuan*” Jurnal Perempuan No. 21 27-31
- Fahimah, Siti. 2017 *Ekofeminisme: Teori dan Gerakan*. Alamtara: Jurnal komunikasi dan Penyiaran Islam. Vol. 1 No. 49-50
- Fitri, Annisal Innal. 2017. *Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen*. Jurnal Ilmu Pemerintahan CosmoGov, Vol 3 No.1 68-70
- Hidayati, Nur. 2020. *Ekofeminisme dalam Perspektif vandana Shiva dan Musdah Mulia*. Skripsi Jurusan Studi Agama-Agama Fakultas Ushuludin dan Filsafat. Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya
- Solichin, Moh. Badrus. *Ketika Alam dan Perempuan Lembah Baliem Diperkosa oleh Antroposentris Kapitalis: Kajian Ekofeminisme dalam Novel Tanah Tabu*. Jurnal Semiotika. Vol. 19 No. 1 (Januari –Juni 2019) hlm. 41-50
- Yogiswari, Krisna Suksma 2018. *Corak Budaya Patriarki Dalam Perkembangan Ilmu Dan Teknologi: Perspektif Ekofeminisme Vandana Shiva*. Jurnal Sanjiwani Vol. 9 No. 2 25-30

- Sukanti, S. 2019. *Peran aktivis Perempuan dalam Menegakkan Keadalian Gender*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol. 8, No 1 12-23
- Suparno, S., & Sutopo, S. 2019. *Ekofeminisme dalam Gerakan Lingkungan Hidup: Studi Kasus di Desa Tlahab, kecamatan Turen, Kabupaten Malang*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 5, No. 1 10-15
- Kumalasari, S., & Rahmatika, D.2020. *Kontribusi Ekofeminisme dalam Pendidikan Lingkungan Hidup*. Jurnal Sosiologi Pendidikan Vol. 3, No. 1 20-25
- Sari, Y. S., & Gustin, O. 2018. *Ekofeminisme dalam Gerakan Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik, Vol. 31, No. 4
- Nurmalina, R. 2017. *Pendidikan Lingkungan dan Gerakan Ekofeminisme dalam Mewujudkan Keseimbangan Ekologis*. Jurnal Pendidikan Karakter. Vol. 7, No. 1 20-27
- Ghalib A. & Darwanto. 2015 *Pengembangan Ekonomi Lokal Untuk Meningkatkan Daya Saing Pada UKM Ekonomi Kreatif Batik Bakaran Di Pati Jawa Tengah*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) 1-10
- Safitri. Ulandari, Nuarizal. Adek, Gistituati. Nurhazizah 2021. *Urgensi Analisa Kebijakan*. Jurnal Riset Tindakan Indonesia Vol. 6, No.1 72-76
- Permatasari. Yudiswara A & Siswandi Gede A. 2022. *Ekofeminisme Di Indonesia: Sebuah Kajian Reflektif Atas Peran Perempuan Terhadap Lingkungan*. Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya. Vol 6, No. 1 59-70
- Maulana, Risal & Nana Supriatna. 2019. *Ekofeminisme: Perempuan, Alam, Perlawanan atas Kuasa Patriarki dan Pembangunan Dunia (Wangari Maathai dan Green Belt Movement 1990 – 2004)*. Jurnal Factum Vol. 8 No. 2 Oktober 2019
- Cahyono, Budi. 2016, *Ekofeminisme*, <http://gkjw.or.id/essay/ekofeminisme/> diakses pada 20 juni 2023, pukul 23.09.
- Davida W. Dana, 2013. *Perempuan dan Lingkungan*, [http://wanita.sabda.org/perempuan dan lingkungan](http://wanita.sabda.org/perempuan_dan_lingkungan) , diakses pada 31 Mei 2023, pukul 14.29.
- Wulansari, Ica & Ridzki R. Sigit. 2017. *Kendeng dan Gerakan Ekofeminisme*. *Opini: Mongabay Situs Berita Lingkungan*. <https://www.mongabay.co.id/2017/>

03/06/kendeng-dan-gerakanekofeminisme/ diakses pada 16 Juni 2023 pukul 10.02 WIB

Pers Rillis Walhi Jawa Tengah 22 Juni 2023. *Keberatan Adanya Tambang Warga Desa Penawangan Geruduk DLHK dan ESDM* <https://www.walhijateng.org/2023/06/22/keberatan-adanya-tambang-warga-desa-penawangan-geruduk-dlhc-dan-esdm-jateng/> Diakses pada 27 Juni 2023 Pukul 09.40

Pers Rillis Walhi Jawa Tengah *Aksi Warga Dieng Tolak Pembangunan PLTP 2 Geo Dipa Dieng* 27 Januari 2022 <https://www.walhijateng.org/2022/01/27/aksi-warga-dieng-tolak-pembangunan-pltp-2-geo-dipa-dieng/> Diakses pada 27 Juni 2023 Pukul 10.30

Ma'rufah, Umi 2019 *Ekofeminisme dan Kearifan Lokal* <https://www.walhijateng.org/2019/04/13/ekofeminisme-dan-kearifanlokal/> Diakses pada 27 Juni 2023 Pukul 11.30

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Aji Muhammad
2. TTL : Grobogan, 6 Juni 1999
3. Alamat : Dusun Sidomulyo, RT 05 RW03 Desa Tanggungharjo,
Kecamatan Grobogan, Kabupaten Grobogan
4. Agama : Islam
5. Jenis Kelamin : Laki-Laki
6. Jurusan/Prodi : Sosiologi
7. Pendidikan : a. SD : SDN 2 Tanggungharjo
b. SMP : MTs Manba'ul Huda
c. SMA : SMA N 1 Grobogan
8. Pengalaman Organisasi : Mawapala
9. No. Hp : 08565056800
10. Email : ajimuhammad346@gmail.com
11. Instagram : aajmm99
12. Motto Hidup : Pergunakan Hari Nikmati Hidup